

# RENCANA KERJA Tahun 2023



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Musi Banyuasin

Jl. Kol. Wahid Udin Lk II Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Muba

# KATA PENGANTAR

Sebagai penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai acuan dalam menetapkan prioritas program dan alat pengendali dalam menyelaraskan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah ditegaskan bahwa pemberian kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan membutuhkan mekanisme perencanaan yang dapat menjamin keselarasan dan keseimbangan pembangunan dalam berbagai tingkatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9) dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 296 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan sebagai acuan kerja dalam satu tahun kedepan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin ditetapkan rencana capaian atau target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan guna mendukung tujuan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2023. Keberhasilan dalam pelaksanaan Renja ini sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal.

Akhirnya semoga Rencana Kerja yang disusun ini dapat bermanfaat bagi terselenggaranya *good governance* di Kabupaten Musi Banyuasin.

SEKAYU, JULI 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



**H. MURSALIN, S.E, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700331 200003 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jln Kolonel Wahid Udin Lingkungan II Kelurahan Serasan Jaya Sekayu 30711  
Telp. 0714 - 321322 Facs. 0714 – 321961 Sekayu 30711  
email : [nakertrans.muba@gmail.com](mailto:nakertrans.muba@gmail.com)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR: 800/ 135 / KPTS/ NAKERTRANS/2022

### TENTANG

#### SK TIM PENYUSUN RENJA TAHUN ANGGARAN 2023

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1(satu) tahun perlu adanya Rencana Kinerja Tahunan yang harus dilaksanakan dalam tahun 2023.
- b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Kerja Perubahan tahun 2023 pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2203 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, tambahan lembaran negaran Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9).
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 296 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 296).
13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16).
14. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 800/205/KPTS/I/Disnakertrans/2022 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Disnakertrans Kab. Muba Tahun 2023-2026.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG RENCANA KINERJA TAHUN 2023 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN.


**KESATU** : Memberlakukan Rencana Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

- KEDUA : Memerintahkan Kepada Semua Pegawai Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk tercapainya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 3 Februari 2022

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**H. MURSALIN, S.E, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700331 200003 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Tentang Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023

Nomor : 800/135 / KPTS/NAKERTRANS/2022  
Tanggal : 3 Februari 2022

---

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022**

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Ketua : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Sekretaris : Kepala Bidang Penempatan Dan Perluasan Kerja
4. Anggota :
  - a. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja.
  - b. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
  - c. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.
  - d. Kepala Bidang Pembangunan Permukiman dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
  - e. Kepala UPTD Balai Latihan Kerja.
  - f. Kepala UPTD UPT Air Balui.
  - g. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
  - h. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**H. MURSALIN, SE, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700331 200003 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jln Kolonel Wahid Udin Lingkungan II Kelurahan Serasan Jaya Sekayu 30711  
Telp. 0714 - 321322 Facs. 0714 – 321961 Sekayu 30711  
email : [nakertrans.muba@gmail.com](mailto:nakertrans.muba@gmail.com)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR: 800/ 442 / KPTS/ NAKERTRANS/2022

### TENTANG

### RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2023

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1(satu) tahun perlu adanya Rencana Kinerja Tahunan yang harus dilaksanakan dalam tahun 2023.
- b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Kerja tahun 2023 pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2203 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, tambahan lembaran negaran Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambagan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9).
13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 296 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 296).
14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16).
15. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 800/205/KPTS/I/Disnakertrans/2022 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Disnakertrans Kab. Muba Tahun 2023-2026.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG RENCANA KINERJA TAHUN 2023 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

**KESATU** : Memberlakukan Rencana Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.



- KEDUA : Penyusunan Renja Tahun 2023 berpedoman pada RPD Tahun 2023-2026 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPD, program prioritas nasional, dan provinsi.
- KETIGA : Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 berpedoman pada Sistematika sebagai berikut:
- BAB I : Pendahuluan
  - BAB II : Hasil Evaluasi Renja PD Tahun Lalu
  - BAB III : Tujuan dan Sasaran PD
  - BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan PD
  - BAB V : Penutup
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 18 Juli 2022

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**H. MURSALIN, S.E, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700331 200003 1 001

# DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Surat Keputusan Penyusunan Renja Tahun 2023 .....	iii
Surat Penetapan Renja Disnakertrans Tahun 2023 .....	iv
Daftar Isi .....	v

## BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	7



## BAB 2 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Tahun Lalu dan Capaian Renstra .....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Muba .....	17
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	28
2.4. Penelaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 .....	41
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	51



## BAB 3 TUJUAN, SASARAN DISNAKERTRANS KAB. MUBA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	52
3.2. Tujuan dan Sasaran SKPD .....	53
3.3. Program dan Kegiatan .....	57





**4**

**BAB  
RENCANA KERJA DAN  
PENDANAAN PERANGKAT  
DAERAH**

4.1. Program Kegiatan SKPD ..... 64

**BAB  
PENUTUP**

**5**



5.1. Catatan Penting yang mendapat Perhatian .....72  
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan ..... 73  
5.3. Rencana Tindak Lanjut ..... 74



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi tersebut merupakan upaya seluruh potensi baik masyarakat, swasta maupun pemerintah. Tercapainya pembangunan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi merupakan cerminan masyarakat yang ditandai oleh penduduknya yang hidup secara layak serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan Sejahtera. Pembangunan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi daerah yang dilaksanakan secara berkesinambungan, dalam satu dekade yang lalu telah cukup berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin ini masih perlu terus ditingkatkan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih dijumpainya masyarakat yang belum hidup secara layak yang ditunjukkan masih relatif tingginya angka pengangguran dan hidup dibawah garis kemiskinan akibat dari keterbatasan lapangan kerja.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam pasal 1 angka 12 disebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Perumusan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten mengacu kepada dokumen perencanaan di tingkat nasional, provinsi dan dokumen perencanaan jangka panjang daerah agar terjaga keselarasan antar dokumen perencanaan tersebut.

Visi Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 adalah : **“MUBA MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA 2025”**.

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, Dokumen RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 juga sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 2005-2025 (Perda Nomor 9 Tahun 2008), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja.
3. Penciptaan Hubungan Industrial yang harmonis dan memperbaiki Iklim Ketenagakerjaan.
4. Peningkatan Perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan.
5. Memperkuat fungsi pendukung (manajemen dan pengawasan internal, serta perencanaan dan pengembangan).

Merujuk juga Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis



Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 sebagai Berikut :

1. Peningkatan Konektivitas Intra dan Antar Perdesaan
2. Peningkatan Kapasitas Sistem, Kelembagaan dan Sumberdaya manusia perdesaan yang unggul.
3. Peningkatan Investasi produk unggulan perdesaan.
4. Pengembangan teknologi tepat guna dan teknologi digital.
5. Peningkatan Keberlanjutan Pembangunan Perdesaan berwawasan lingkungan
6. Peningkatan dan pemanfaatan modal social budaya untuk pembangunan perdesaan.

Hal ini keterkaitan dengan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dalam rangka :

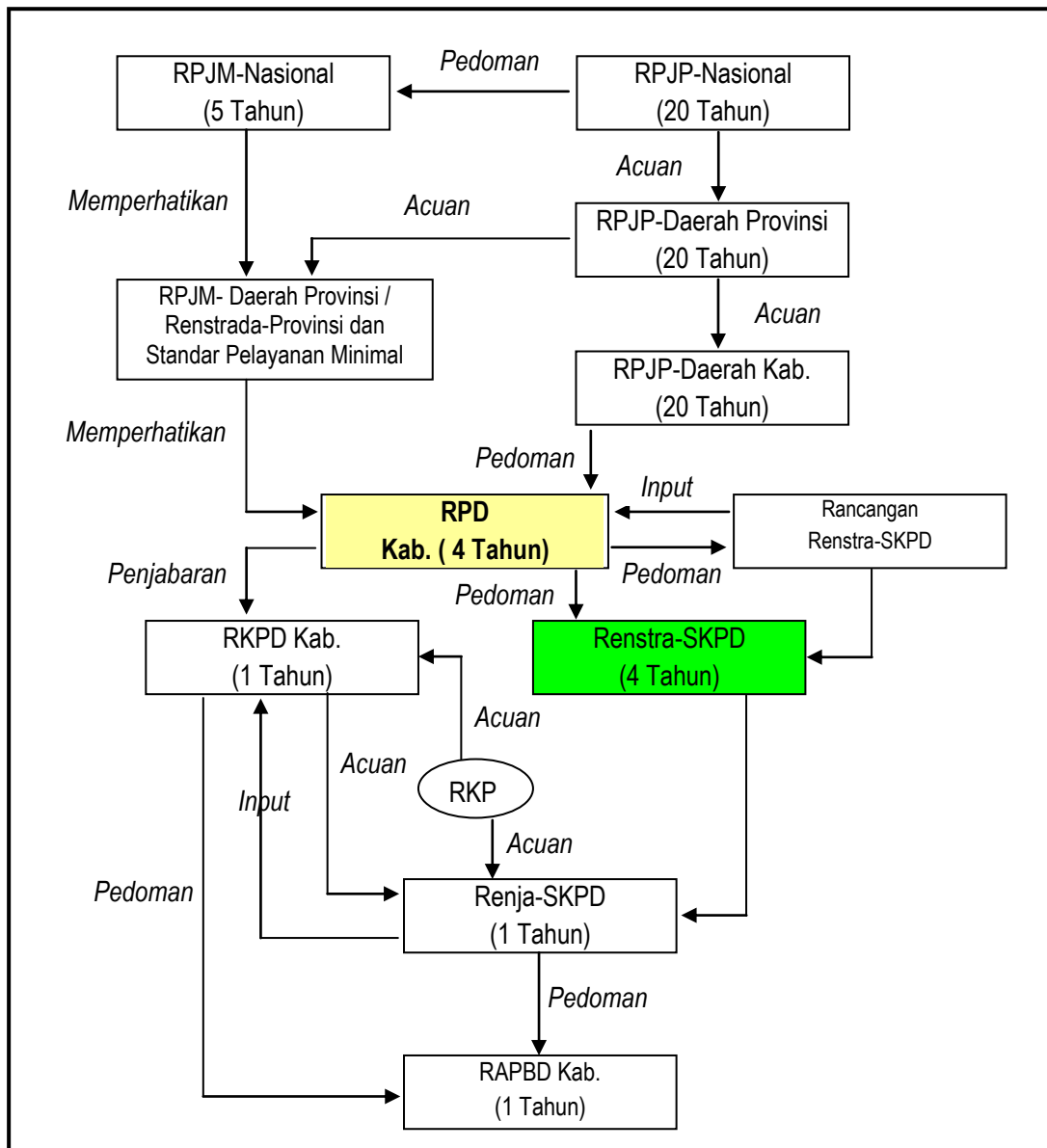
1. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka
2. Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja.
3. Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja.
5. Menurunnya Angka Sengketa Pekerja dan Perusahaan di Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Meningkatnya Pelayanan dan Taraf Hidup Masyarakat Transmigrasi.
7. Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan yaitu jangka panjang 20 (dua puluh) tahunan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), jangka menengah 5 (lima) tahunan disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana tahunan disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk Rencana lima tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah disebut Renstra SKPD dan untuk rencana tahunan SKPD disebut Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Bayuasin. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah

Berakhir Pada Tahun 2022. Rancangan Renja PD Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan yang juga merupakan penjabaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin.

Gambaran tentang hubungan antara Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.

**Gambar 1.1.**  
**Hubungan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kabupaten Musi Banyuasin 2023 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



Dalam kaitan dengan **sistem keuangan** sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003, maka penjabaran Renstra SKPD setiap tahunnya yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja) SKPD akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD satu tahun ke depan. Dengan demikian SKPD dapat menentukan besaran anggaran yang diperlukan dalam upaya melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dan secara bertahap akan memenuhi target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra-PD.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

1. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang SAKIP
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal (SPM);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah



Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);

14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 296 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin;
15. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);
17. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 800/205/ KPTS/ I/ Disnakertrans/2022 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin merupakan organisasi perangkat daerah dengan mempedomani kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai rancangan Rencana Kerja tahun 2023 yang dimaksudkan memberikan arahan bagi seluruh Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel ;
2. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur perencana dalam perumusan substansi perencanaan tahunan yang lebih jelas, rinci dan terukur dan difokuskan pada arah kebijakan Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Memberikan kejelasan terhadap pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi;



4. Sebagai upaya mengakomodasikan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui koordinasi, konsultasi dan interaksi baik antar instansi dan sektor.
5. Sebagai Pedoman dalam Penyusunan APBD Tahun 2023.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin 2023 disusun dalam lima bab yang tersusun atas ;

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2023.

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat Telaah terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Program Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023

##### **BAB V PENUTUP**



## BAB II

# HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

### 2.1. EVALUASI CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

Pada tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan 7 Program, 15 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan . Realisasi anggaran yang digunakan adalah Rp.13.290.684.381 atau 93,40 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 14.224.650.000,-

Program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Daftar Realisasi Program Kegiatan Tahun Anggaran 2021**

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Penyerapan Keuangan (Rp)	%
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>11.340.831.580</b>	<b>99,97%</b>	<b>10.717.119.305</b>	<b>94,5</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>49.840.000</b>			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.920.000	100 %	12.816.000	50
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.920.000	100%	24.894.000	99,9
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.501.000.000</b>			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>5.501.000.000</b>	100%	5.111.680.401	92,9



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Penyerapan Keuangan (Rp)	%
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>30.000.000</b>		<b>25.695.500</b>	<b>85,65</b>
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	30.000.000	100 %	25.695.500	85,65
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>275.695.000</b>		<b>208.640.700</b>	<b>75,70</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	275.695.000	100 %	208.640.700	75,70
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>888.449.380</b>	<b>99,54%</b>	<b>856.943.397</b>	<b>96,50</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	100%	24.970.550	99,98
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000	100%	59.940.900	99,99
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	161.396.280	100%	161.231.125	99,99
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	211.157.100	100%	186.802.140	88,47
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	100%	25.000.000	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.190.000	50%	2.205.000	26,92
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	397.706.000	100%	396.793.682	99,77
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.039.050.000</b>	<b>100%</b>	<b>984.453.988</b>	<b>94,80</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	266.400.000	100%	211.803.988	79,51
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	772.650.000	100%	722.650.000	100
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>	<b>3.556.797.200</b>	<b>100%</b>	<b>3.491.995.319</b>	<b>98,20</b>
	Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.290.000	100%	134.952.127	90,4
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.390.937.200	100%	3.340.682.500	98,52
	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>393.484.060</b>	<b>100%</b>	<b>393.230.260</b>	<b>99,9</b>
	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>393.484.060</b>	<b>100%</b>	<b>393.484.060</b>	<b>99,9</b>
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	393.484.060	100%	393.230.260	99,94
	<b>PROGRAM KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>827.111.400</b>	<b>100%</b>	<b>761.241.500</b>	<b>92</b>
	<b>Pelaksanaan Pelatihan Unit Kompetensi</b>	<b>827.111.400</b>	<b>100%</b>	<b>761.241.500</b>	<b>92</b>



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Penyerapan Keuangan (Rp)	%
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	827.111.400	100%	761.241.500	92
	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>429.700.000</b>	100%	<b>367.721.966</b>	<b>85,58</b>
	<b>Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>229.934.000</b>	<b>100%</b>	<b>229.880.200</b>	<b>99,98</b>
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	229.934.000	100%	229.880.200	99,98
	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>199.766.000</b>	<b>100%</b>	<b>137.841.766</b>	<b>69</b>
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	199.766.000	100%	137.841.766	69
	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>928.952.960</b>	<b>100%</b>	<b>793.835.400</b>	<b>85,5</b>
	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah</b>	<b>200.575.000</b>	<b>100%</b>	<b>165.647.600</b>	<b>82,59</b>
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	200.575.000	100%	165.647.600	82,59
	<b>Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>728.377.960</b>	<b>100%</b>	<b>628.187.800</b>	<b>86,20</b>
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	604.156.940	100%	504.856.000	83,56
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota	124.221.000	100%	123.331.800	99,28
	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>100.000.000</b>	100%	<b>98.526.350</b>	<b>98,5</b>
	<b>Penataan Persebaran penduduk yang berasal dari 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>98.526.350</b>	<b>98,5</b>
	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi Bagi Penduduk setempat dan transmigran	100.000.000	100%	98.526.350	98,5



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Penyerapan Keuangan (Rp)	%
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>199.766.000</b>	100%	<b>137.841.766</b>	<b>69</b>
	<b>Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian</b>	<b>199.766.000</b>	<b>100%</b>	<b>137.841.766</b>	<b>69</b>
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian satuan Permukiman	199.766.000	100%	137.841.766	69
	<b>JUMLAH</b>	<b>14.224.650.000</b>	<b>99,97 %</b>	<b>13.290.684.381</b>	<b>93,40</b>

Berdasarkan Capaian Kinerja Keuangan dan Fisik Kegiatan Disnakertrans Tahun 2021 untuk Realisasi Keuangan sebesar 93,40%, sedangkan capaian Fisik tidak mencapai 99,97%. Pada tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan 6 Program 15 Kegiatan;

- Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yaitu program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota rencana target fisik 100% dan keuangan 100% anggaran Rp. 11.340.831.580 berdasarkan realisasi anggaran Rp. 10.717.119.305 atau sebesar 94,5% capaian Fisik Kegiatan 99,97%.
- Realisasi Program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yaitu :
  - 1) Program Perencanaan Tenaga Kerja rencana target capaian Fisik 100% dan keuangan sebesar 100% dengan anggaran Rp. 393.484.060 berdasarkan realiasi anggaran Rp. 393.230.260 atau sebesar 99,9% realisasi Fisik 100%.
  - 2) Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja rencana target fisik 100% dan keuangan sebesar 100% dengan anggaran Rp. 827.111.400 berdasarkan realisasi anggaran Rp. 761.241.500 atau sebesar 92% dengan realisasi fisik kegiatan 100%.
  - 3) Program Penempatan dan Tenaga Kerja rencana target fisik 100% dan keuangan sebesar 100% dengan anggaran Rp. 429.700.000 berdasarkan realisasi anggaran Rp.367.721.966 atau sebesar 85,58% dengan fisik kegiatan 100%.
  - 4) Program Hubungan Industrial rencana target fisik 100% dan keuangan sebesar 100% dengan anggaran Rp. 928.952.960 berdasarkan realisasi anggaran Rp. 793.835.400 atau sebesar 85,50% dengan fisik kegiatan 100%.



- 5) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi rencana target fisik 100% dan keuangan sebesar 100% anggaran Rp. 100.000.000 berdasarkan realisasi anggaran Rp. 98.526.350 atau sebesar 98,5% dengan fisik kegiatan 100%.
  - 6) Program Kawasan Pengembangan Kawasan Transmigrasi rencana target fisik 100% dan keuangan sebesar 100% anggaran Rp. 199.766.000 berdasarkan realisasi anggaran Rp. 137.841.766 atau sebesar 69% dengan fisik kegiatan 100%.
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya rencana target pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu capaian Fisik 50% dikarenakan kegiatan koordinasi / kunjungan tamu tidak banyak dilakukan secara langsung (luring) tetapi rapat koordinasi dilakukan secara online.
  - Implikasi terhadap capaian program Renstra Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021 secara target program kegiatan sudah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu realisasi fisik kegiatan sudah mencapai 100%.
  - Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan;
    - Peningkatan capaian kinerja yang telah ditetapkan
    - Fokus perencanaan penganggaran pada kegiatan penempatan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
    - Melakukan sinergi dengan berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan pelatihan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan pengawasan tenaga kerja.

Berdasarkan hasil evaluasi Kinerja program/kegiatan Rencana Kerja Tahun 2022 telah memenuhi target. Walaupun ada beberapa program/kegiatan yang kurang dari target, namun secara keseluruhan kinerja yang dicapai adalah baik. Berikut ini disajikan table evaluasi pelaksanaan Renja 2020 dan 2022.

**TABEL 2.2**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2022**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah )Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Operator yang Kompetensi di Bidangny	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Laporan Keuangan yang disampaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Dokumen	100%	Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Dokumen	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Dokumen	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Dokumen	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Dokumen	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Dokumen	100%	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Dokumen	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Dokumen	100%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 47 orang	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 47 orang	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 47 orang	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 47 orang	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 47 orang	100%	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 49 orang	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 49 orang	100%
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>									
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Premi Asuransi Kendaraan Dinas Roda Empat 4 Unit	Premi Asuransi Kendaraan Dinas Roda Empat 4 Unit	Premi Asuransi Kendaraan Dinas Roda Empat 4 Unit	Premi Asuransi Kendaraan Dinas Roda Empat 4 Unit	Premi Asuransi Kendaraan Dinas Roda Empat 4 Unit	100%	Premi Asuransi Kendaraan Dinas Roda Empat 3 Unit	Premi Asuransi Kendaraan Dinas Roda Empat 3 Unit	100%
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>									
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 1 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 1 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 1 Paket	-	-	0%	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 1 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 1 Paket	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya ASN yang mengikuti Diklat 12 orang	Terlaksananya ASN yang mengikuti Diklat 12 orang	Terlaksananya ASN yang mengikuti Diklat 12 orang	Terlaksananya ASN yang mengikuti Diklat 23 orang	Terlaksananya ASN yang mengikuti Diklat 21 orang	98%			0%



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah )Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Bagi ASN sebanyak 20 orang		Bimbingan Teknis Bagi ASN sebanyak 20 orang	Bimbingan Teknis Bagi ASN sebanyak 20 orang	Bimbingan Teknis Bagi ASN sebanyak 20 orang	100%	Bimbingan Teknis Bagi ASN sebanyak 20 orang	Bimbingan Teknis Bagi ASN sebanyak 20 orang	100%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket	100%	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 1 Paket	100%	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 1 Paket	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 1 Paket	100%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 1 Paket	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan 2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan 2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan 2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan 2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan 2 Paket	100%	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan 2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan 2 Paket	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan 2 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan 2 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan 2 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan 2 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan 2 Dokumen	100%	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan 2 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan 2 Dokumen	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu 12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu 12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu 12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu 12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu 12 Laporan	100%	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu 12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu 12 Laporan	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan	100%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan	100%
	<b>Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									
	Pengadaan Mebel	Pengadaan Meubeler 5 Jenis	Pengadaan Meubeler 3 Jenis	Pengadaan Meubeler 3 Jenis	Pengadaan Meubeler 3 Jenis	Pengadaan Meubeler 3 Jenis	100%	Pengadaan Meubeler 3 Jenis	Pengadaan Meubeler 3 Jenis	50%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 16 Jenis	Sarana dan Prasarana Gedung 8 Jenis	Sarana dan Prasarana Gedung 8 Jenis	Sarana dan Prasarana Gedung 8 Jenis	Sarana dan Prasarana Gedung 8 Jenis	100%	Sarana dan Prasarana Gedung 8 Jenis	Sarana dan Prasarana Gedung 8 Jenis	50%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12 Laporan	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12 Laporan	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah )Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68,59%	70,61%	68,53	69,18	101	68,59	*)	68,59
		Persentase Pekerja yang ditempatkan	58%	38,66%	58%	40,66%	71,33%	58%	12,20%	21%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,24%	4,79%	4,44%	3,99%	110%	4,24%	*)	4,24%
	<b>Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Operasional Penunjang Layanan Unit Disabilitas Ketenagakerjaan 1 Kegiatan	Operasional Penunjang Layanan Unit Disabilitas Ketenagakerjaan 1 Kegiatan	Operasional Penunjang Layanan Unit Disabilitas Ketenagakerjaan 1 Kegiatan	Operasional Penunjang Layanan Unit Disabilitas Ketenagakerjaan 1 Kegiatan	Operasional Penunjang Layanan Unit Disabilitas Ketenagakerjaan 1 Kegiatan	100%	Operasional Penunjang Layanan Unit Disabilitas Ketenagakerjaan 1 Kegiatan	Operasional Penunjang Layanan Unit Disabilitas Ketenagakerjaan 1 Kegiatan	100%
	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*)	100%
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Pengelolaan Aplikasi Si ITIK 1 Aplikasi	Pengelolaan Aplikasi Si ITIK 1 Aplikasi	Pengelolaan Aplikasi Si ITIK 1 Aplikasi	Pengelolaan Aplikasi Si ITIK 1 Aplikasi	Pengelolaan Aplikasi Si ITIK 1 Aplikasi	80%	Pengelolaan Aplikasi Si ITIK 1 Aplikasi	Pengelolaan Aplikasi Si ITIK 1 Aplikasi	50%
		Rekomendasi Pembentukan Bursa Tenaga Kerja Khusus 14 Unit BKK	Rekomendasi Pembentukan Bursa Tenaga Kerja Khusus 14 Unit BKK	Rekomendasi Pembentukan Bursa Tenaga Kerja Khusus 14 Unit BKK	Rekomendasi Pembentukan Bursa Tenaga Kerja Khusus 14 Unit BKK	Rekomendasi Pembentukan Bursa Tenaga Kerja Khusus 14 Unit BKK		Rekomendasi Pembentukan Bursa Tenaga Kerja Khusus 14 Unit BKK	Rekomendasi Pembentukan Bursa Tenaga Kerja Khusus 14 Unit BKK	
		Pembuatan AK.1 23.000 Lembar	Pembuatan AK.1 23.000 Lembar	Pembuatan AK.1 23.000 Lembar	Pembuatan AK.1 23.000 Lembar	Pembuatan AK.1 23.000 Lembar		Pembuatan AK.1 23.000 Lembar	Pembuatan AK.1 23.000 Lembar	
		Tersedianya Informasi Tentang Ketenagakerjaan 1 Event	Tersedianya Informasi Tentang Ketenagakerjaan 1 Event	Tersedianya Informasi Tentang Ketenagakerjaan 1 Event	Tersedianya Informasi Tentang Ketenagakerjaan 1 Event	Tersedianya Informasi Tentang Ketenagakerjaan 1 Event				
	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Angka Seketa Pengusaha Pekerja Pertama	5,10%	12,59%	5,40%	8,80%	37,04%	5,10%		5,10%
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kab/ Kota	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1(satu) Daerah Kab/ Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Dokumen Untuk Rekomendasi Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten 1 Dokumen	Dokumen Untuk Rekomendasi Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten 1 Dokumen	Dokumen Untuk Rekomendasi Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten 1 Dokumen	Dokumen Untuk Rekomendasi Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten 1 Dokumen	Dokumen Untuk Rekomendasi Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten 1 Dokumen	100%	Dokumen Untuk Rekomendasi Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten 1 Dokumen	Dokumen Untuk Rekomendasi Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten 1 Dokumen	100%
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota									
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat / berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Selesaiannya Kasus Perselisihan Hubungan Industrial 250 Kasus	Selesaiannya Kasus Perselisihan Hubungan Industrial 50 Kasus	Selesaiannya Kasus Perselisihan Hubungan Industrial 150 Kasus	Selesaiannya Kasus Perselisihan Hubungan Industrial 50 Kasus	Selesaiannya Kasus Perselisihan Hubungan Industrial 50 Kasus	100%	Selesaiannya Kasus Perselisihan Hubungan Industrial 50 Kasus	Selesaiannya Kasus Perselisihan Hubungan Industrial 50 Kasus	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah )Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<p>Terlaksananya Perusahaan yang mendapat Pembinaan Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial 250 Perusahaan</p> <p>Sidang Mediasi Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Tingkat Perusahaan 250 Perusahaan</p> <p>Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan 250 Perusahaan</p>	<p>Terlaksananya Perusahaan yang mendapat Pembinaan Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial 50 Perusahaan</p> <p>Sidang Mediasi Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Tingkat Perusahaan 50 Perusahaan</p> <p>Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan 50 Perusahaan</p>	<p>Terlaksananya Perusahaan yang mendapat Pembinaan Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial 150 Perusahaan</p> <p>Sidang Mediasi Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Tingkat Perusahaan 150 Perusahaan</p> <p>Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan 150 Perusahaan</p>	<p>Terlaksananya Perusahaan yang mendapat Pembinaan Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial 50 Perusahaan</p> <p>Sidang Mediasi Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Tingkat Perusahaan 50 Perusahaan</p> <p>Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan 50 Perusahaan</p>	<p>Terlaksananya Perusahaan yang mendapat Pembinaan Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial 50 Perusahaan</p> <p>Sidang Mediasi Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Tingkat Perusahaan 50 Perusahaan</p> <p>Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan 50 Perusahaan</p>		<p>Terlaksananya Perusahaan yang mendapat Pembinaan Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial 50 Perusahaan</p> <p>Sidang Mediasi Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Tingkat Perusahaan 50 Perusahaan</p> <p>Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan 50 Perusahaan</p>	<p>Terlaksananya Perusahaan yang mendapat Pembinaan Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial 50 Perusahaan</p> <p>Sidang Mediasi Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Tingkat Perusahaan 50 Perusahaan</p> <p>Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan 50 Perusahaan</p>	
	Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama Tripartit daerah Kabupaten/Kota	<p>Pembinaan LKS Bipartit 250 Perusahaan</p> <p>LKS Tripartit di Kabupaten 1 LKS Tripartit</p>	<p>Pembinaan LKS Bipartit 200 Perusahaan</p> <p>LKS Tripartit di Kabupaten 1 LKS Tripartit</p>	<p>Pembinaan LKS Bipartit 50 Perusahaan</p> <p>LKS Tripartit di Kabupaten 1 LKS Tripartit</p>	<p>Pembinaan LKS Bipartit 50 Perusahaan</p> <p>LKS Tripartit di Kabupaten 1 LKS Tripartit</p>	<p>Pembinaan LKS Bipartit 50 Perusahaan</p> <p>LKS Tripartit di Kabupaten 1 LKS Tripartit</p>	100%	<p>Pembinaan LKS Bipartit 50 Perusahaan</p> <p>LKS Tripartit di Kabupaten 1 LKS Tripartit</p>	<p>Pembinaan LKS Bipartit 50 Perusahaan</p> <p>LKS Tripartit di Kabupaten 1 LKS Tripartit</p>	100%
	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Persentase Transmigran Umum yang ditempatkan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>
	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah	Terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1(satu) Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi Bagi penduduk Setempat dan Transmigran	Adanya Pembekalan Relokasi Warga Transmigrasi UPT Jud Nganti SP3 Sebanyak 110 KK	Adanya Pembekalan Relokasi Warga Transmigrasi UPT Jud Nganti SP3 Sebanyak 20 KK	Adanya Pembekalan Relokasi Warga Transmigrasi UPT Jud Nganti SP3 Sebanyak 80 KK	Adanya Pembekalan Relokasi Warga Transmigrasi UPT Jud Nganti SP3 Sebanyak 20 KK	Adanya Pembekalan Relokasi Warga Transmigrasi UPT Jud Nganti SP3 Sebanyak 20 KK	100%	Jalan Lingkungan (Permukiman RelokasiWarga Transmigrasi) 424 Meter	-	0
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Persentase Pembinaan Warga Transmigrasi</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>86%</b>	<b>100%</b>	<b>116,28</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>
	Pengembangan Satuan dan Permukiman Pada Tahap Kemandirian	Terlaksananya Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian	100%		100%	100%	100%	100%		100%
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Pelatihan Produk Unggulan 300 orang	Pelatihan Produk Unggulan 60 orang	Pelatihan Produk Unggulan 250 orang	Pelatihan Produk Unggulan 60 orang	Pelatihan Produk Unggulan 60 orang	100%	0	0	0

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

### a) Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Meningkatnya Kesempatan Kerja

**Tabel. 2.3**  
**Hasil Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Meningkatkan Kesempatan Kerja Tenaga Kerja Tahun 2021**

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	RENCANA 2021	REALISASI	% CAPAIAN
1	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Indeks	50	51,04	102
2	Rasio Penduduk yang Bekerja	%	85	66,42	78,14
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,53	69,18	101
4	Persentase Pekerja yang ditempatkan	%	57	40,66	71,33
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,44	3,99	110
6	Angka Sengketa Pekerja Pertahun	%	5,4	8,8	37,04

#### 1. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di suatu daerah. Aspek yang diukur dalam Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terdiri dari 9 indikator utama yaitu perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan kerja dan kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja, serta jaminan sosial tenaga kerja. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan diperoleh dari penjumlahan 9 indikator utama yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

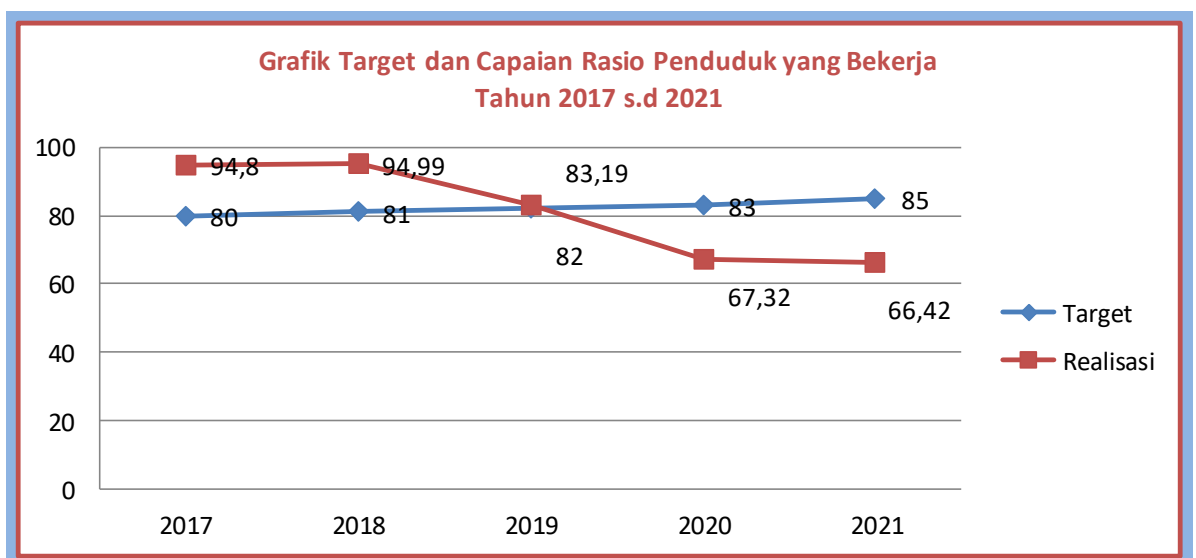
$$IPK = I.PTK + I.PdTK + I.KK + I.PKK + I.Prod + I.HI + I.KLK + I.UPAH + I.JSTK$$

Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Kabupaten Musi Banyuasin yang tahun 2021 menghasilkan nilai indeks sebesar 51,04. Angka ini masih berada pada kategori menengah bawah. Meskipun demikian angka ini sudah melebihi target capaian Indeks Pembangunan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 sebesar 50 dengan persentasi capaian sebesar 102%. Jika dilihat berdasarkan masing-masing indikatornya terdapat beberapa indikator utama yang masih perlu ditingkatkan misalnya indikator hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja, serta indikator.

## 2. Rasio Penduduk Bekerja

Rasio penduduk bekerja merupakan perbandingan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bersatus bekerja dengan total penduduk berusia 15 tahun ke atas. Rasio penduduk bekerja dirumuskan sebagai berikut:

$$Rasio\ Penduduk\ Bekerja = \frac{Penduduk\ Bekerja}{Penduduk\ Usia\ 15th\ ke\ atas} \times 100\%$$

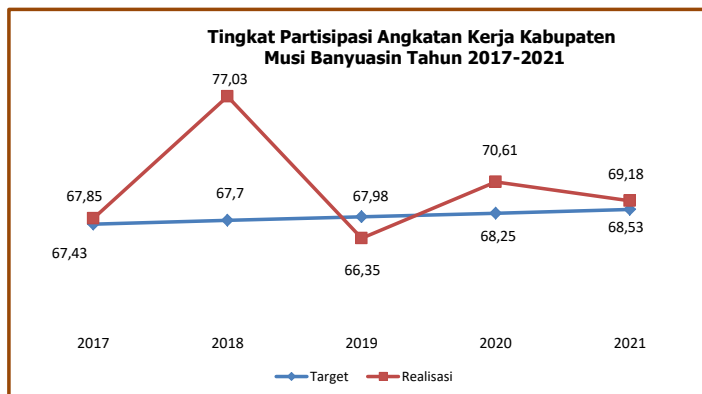


Rasio penduduk bekerja Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021 sebesar 66,42%. Angka ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat sebanyak 66,42% penduduk Musi Banyuasin berstatus bekerja, dimana perbandingan penduduk yang bekerja sebanyak 318.096 orang dengan penduduk usia kerja sebanyak 478.902 orang. Hasil Rasio penduduk bekerja tahun 2021 masih dibawah rencana target 85% adapun persentasi capaian sebesar 78,14%. Meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, angka ini tetap menunjukkan bahwa penduduk bekerja di Kabupaten Musi Banyuasin cukup banyak.

### 3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) persentase penduduk penduduk usia 15 tahun ke atas yang bersatus sebagai angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari penduduk bekerja serta pengangguran. TPAK menunjukkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan maka semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dirumuskan sebagai berikut:

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Penduduk Usia 15th ke atas}} \times 100\%$$

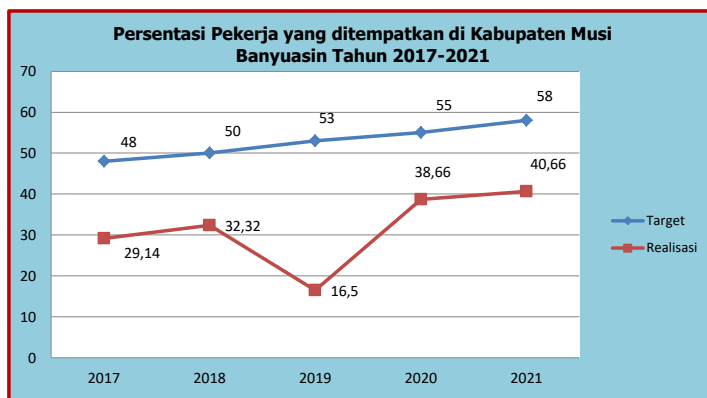


Pada tahun 2021 diperoleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Musi banyuasin sebesar 69,18 persen, dimana perbandingan antara Jumlah angkatan kerja sebanyak 147.576 orang dengan penduduk usia 15 tahun keatas sebanyak 478.902 Angka ini menunjukkan bahwa sebanyak 69,18 persen penduduk Kabupaten Musi Banyuasin merupakan penduduk yang aktif secara ekonomi. Meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya akan tetapi angka ini masih melampaui target sebesar 68,53% dengan persentasi capaian sebesar 101% di tahun 2021.

#### 4. Persentase Pekerja yang ditempatkan

Persentasei Pekerja yang ditempatkan dimana jumlah tenaga kerja yang ditempatkan perbandingan jumlah pencari kerja yang terdaftar dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pekerja yang ditempatkan} = \frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah Pencari kerja yang terdaftar}} \times 100$$



Pada tahun 2021 diperoleh Persentase Pekerja yang ditempatkan Kabupaten Musi banyuasin sebesar 40,66 persen. Angka ini menunjukkan bahwa pencari kerja yang terdaftar hanya 40,66% dimana perbandingan sebanyak 805 orang pencari kerja yang ditempatkan dengan sebanyak 1980 orang pencari kerja yang terdaftar. Realisasi ini masih dibawah target yang telah ditetapkan sebesar 57% Meskipun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya akan tetapi angka ini masih melampaui target capaian sebesar 71,33% di tahun 2021.

Penyebab rendahnya penempatan tenaga kerja sebagai berikut :

1. Lowongan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja
2. Kesempatan kerja tidak sesuai dengan dengan kualifikasi pencari kerja

Tindak lanjut yang dilakukan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam meningkatkan kesempatan kerja, sebagai berikut :

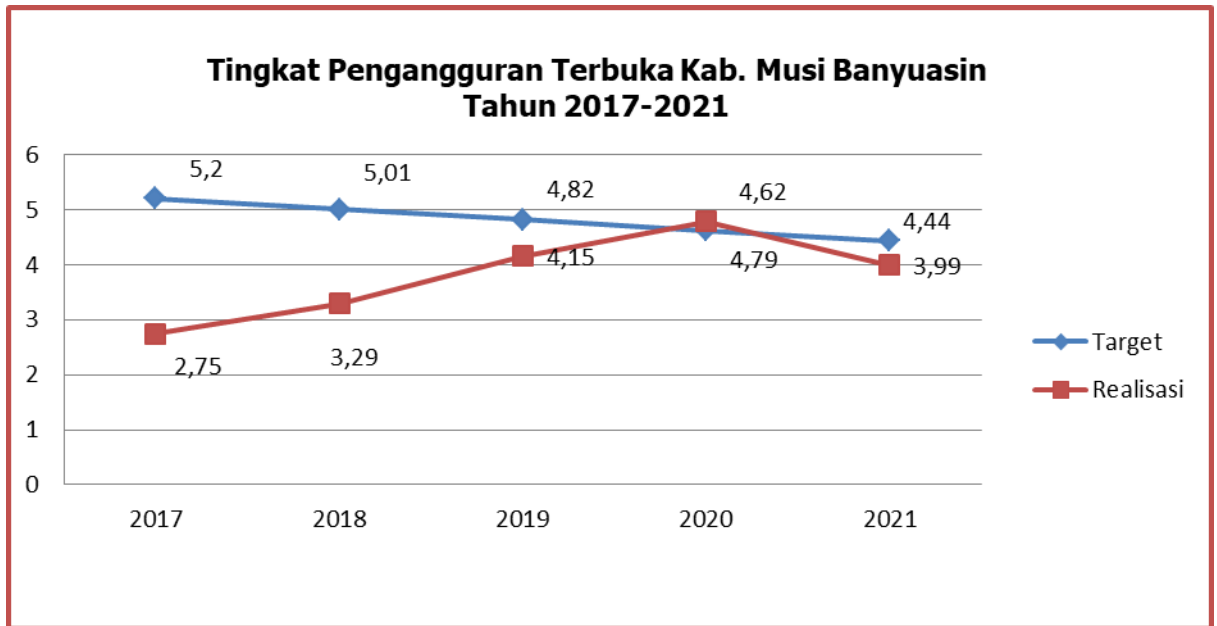
1. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pelatihan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan pengawasan ketenagakerjaan.
2. Mengoptimalkan keberadaan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK se Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Penyebaran Informasi lowongan kerja seluas-luasnya.
4. Pelatihan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

## 5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran dengan angkatan kerja. Sesuai dengan namanya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan jumlah penduduk menganggur di suatu wilayah dimana berdasarkan konsep seseorang dikatakan menganggur apabila memenuhi kondisi sedang aktif mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dirumuskan sebagai berikut:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$





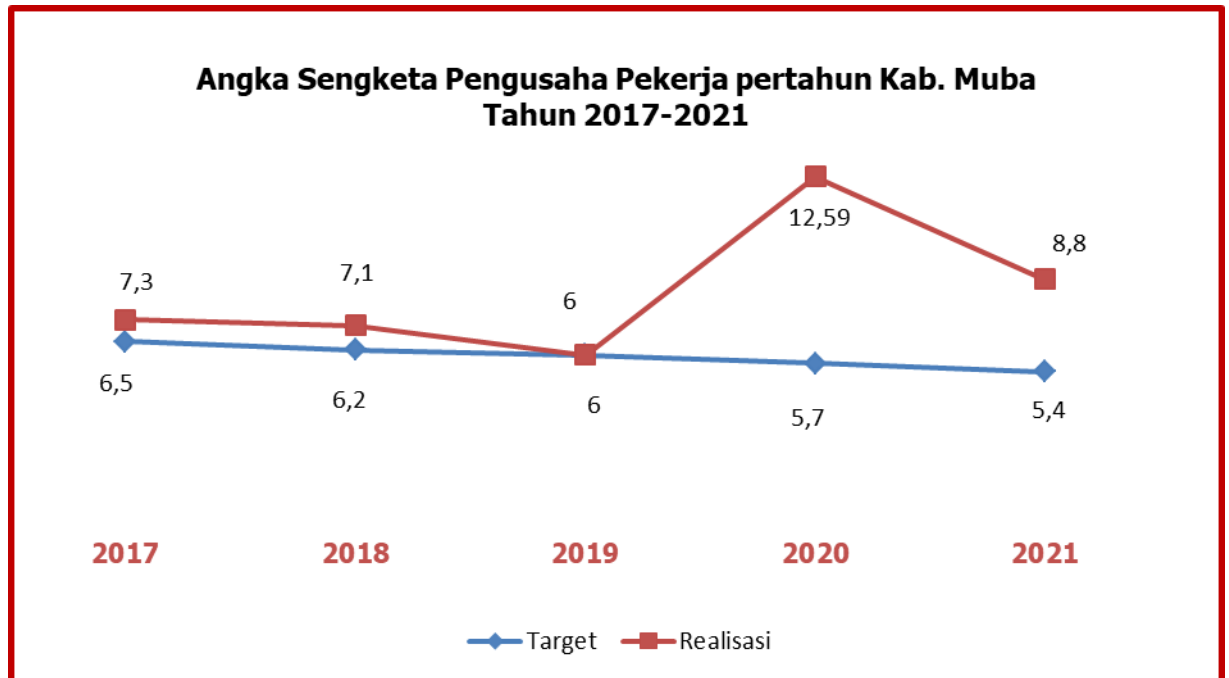
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021 sebesar 3,99 yang artinya masih terdapat sebanyak 3,99 persen masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin yang berstatus pengangguran. Dimana perbandingan ini sebanyak 13.230 orang pengangguran dengan jumlah angkatan kerja sebesar 331.326 orang. Meskipun demikian, angka ini menunjukkan terjadinya penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Musi Banyuasin dibanding tahun sebelumnya yang bernilai 4,79. Selain itu TPT Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021 sudah memenuhi target capaian sebesar 110 % tahun 2021.

Keberhasilan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka di Musi Banyuasin dikarenakan kondisi pemulihan pasca covid-19, dimana sector-sektor yang sebelumnya mengalami dampak kembali dapat beraktivitas.

## 6. Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun

Angka Sengketa pengusaha Pekerja Pertahun perbandingan antara jumlah sengketa dalam satu tahun dengan jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021 dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase Angka Sengketa Pengusaha Pekerja pertahun}}{\text{Jumlah Perselisihan dalam tahun } n} \times 100$$



Angka sengketa pengusaha pekerja tahun 2021 Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 8,8%, dimana perbandingan ini didapat jumlah perselisihan yang terdaftar pada tahun 2021 sebanyak 38 Kasus terdiri dari 35 phk, 2 perselisihan hak, dan 1 kepentingan hak dengan jumlah perusahaan 433 perusahaan. Berdasarkan target yang ditetapkan sebesar 5,4%. Persentasi capaian sebesar 37,04% pada tahun 2021. Penyebab masih tingginya sengketa diperusahaan adalah pekerja dan pengusaha belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan peraturan ketenagakerjaan, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada pekerja dan pengusaha tentang peraturan ketenagakerjaan.

**b) Meningkatnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi**

**Tabel.2.4  
Hasil Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Pengembangan Kawasan  
Transmigrasi Tahun 2021**

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	RENCANA 2021	REALISASI	% CAPAIAN
1	Persentase Transmigrasi yang ditempatkan	%	100	100	100
2	Persentase Pembinaan Warga Transmigrasi	%	86	100	116,28

Untuk capaian Indikator Persentase Transmigrasi umum yang ditempatkan pada tahun 2015 dan tahun 2016 terdiri dari UPT Air Balui 1 sebanyak 185 KK, UPT JUD Nganti Kecamatan Sanga Desa, jadi capaian kinerja sebanyak 100 %.

**c) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran**

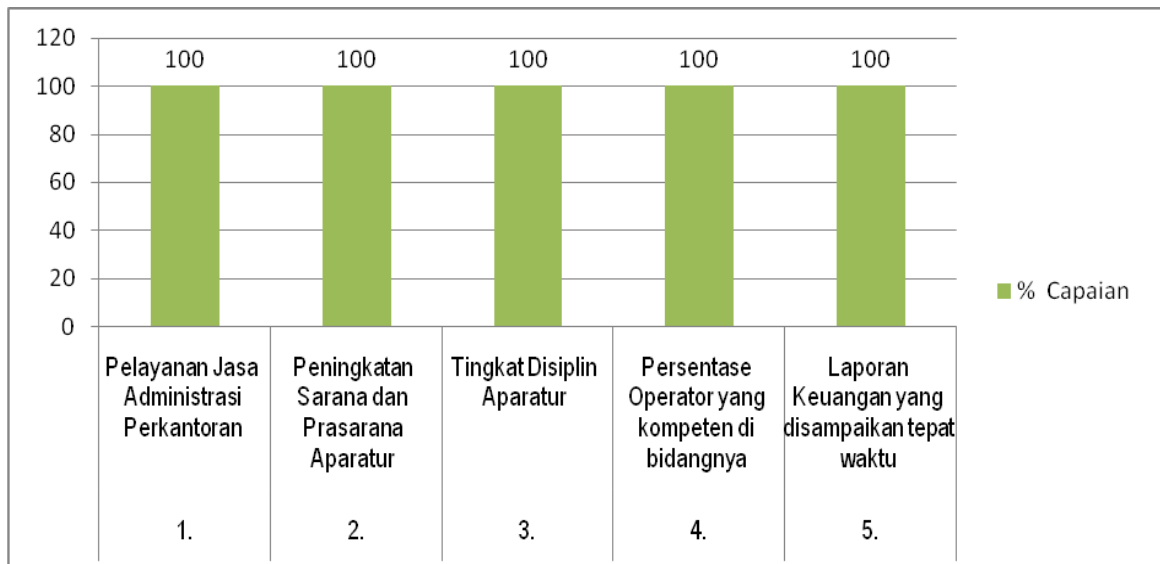
**Tabel.2.5**

**Hasil Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Kualitas  
Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2021**

Nama Indikator		Satuan	Rencana 2021	Realisasi	% Capaian
1.	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	%	100	100	100
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100
3.	Tingkat Disiplin Aparatur	%	100	100	100
4.	Persentase Operator yang kompeten di bidangnya	%	100	100	100
5.	Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	%	100	100	100

**Gambar 2.3**

**Grafik Capaian Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Tahun 2021**



- 1) Pada Indikator Pelayanan jasa administrasi perkantoran didukung oleh 12 kegiatan dengan rencana pada tahun 2019 sebesar 100 dengan perbandingan realisasi 100 maka capaian sebesar 100%.

Untuk melihat perbandingan capaian indicator kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021 dan pada akhir Renstra Tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini :



**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**  
**Kabupaten Musi Banyuasin**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022 (TW II)	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	9				10	11	12		
1	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan		Indeks	50	55	-	-	51,04	*)	-	-	<i>Terdapat Perbedaan Indikator Kinerja Renstra Tahun 2017-2022 dan Indikator KinerjaRenstra Tahun 2023-2026</i>
2	Rasio Penduduk yang bekerja		%	85	85	-	-	66,42	*)	-	-	
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		%	68,53	68,59	-	-	69,18	*)	-	-	
4	Persentasi Pekerja yang ditempatkan		%	57	58	42,60	43,50	40,66	12,2	42,60	43,50	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka		%	4,44	4,24	3,8	3,65	3,99	*)	-	-	
6	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun		%	5,4	5,1	7,8	6,5	8,8	3,2%	7,8	6,5	
7	Persentase Transmigrasi Umum yang ditempatkan		%	100	100	-	-	100	*)	-	-	
8	Persentase Pembinaan Warga Transmigrasi		%	86	100	-	-	100	*)	-	-	
9	Dokumen Rencana Tenaga Kerja		Dokumen	-	-	1	1	-	-	1	1	
10	Persentase Tenaga Kerja Terlatih		%	-	-	24,1	25,2	-	-	24,1	25,2	
11	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja		%	-	-	50	80	-	-	50	80	



No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022 (TW II)	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	9				10	11	12		
12	Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan		%	-	-	41	49	-	-	41	49	
13	Persentase Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi		%	-	-	22	40	-	-	22	40	
14	Persentase Pembinaan Warga Transmigrasi Relokasi		%	-	-	49	61	-	-	49	61	

*\*) Belum Tersedianya Angka Capaian Kinerja dikeluarkan oleh BPS Kab. Muba*

### 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

#### A. Kinerja Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Muba

Berdasarkan sasaran yang telah dicapai dalam pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian selama lima tahun, maka jenis pelayanan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasi dikelompokkan dalam 2 (dua) urusan wajib Bidang Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Bidang Ketransmigrasian, dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. BIDANG KETENAGAKERJAAN

Pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan hasil yang dicapai dari Program yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada Tabel-tabel Berikut :

- 1) Pelayanan dalam rangka peningkatan pelatihan Keterampilan dan Produktivitas bagi calon Tenaga Kerja, dalam rangka pembangunan Ketenagakerjaan telah dilaksanakan program-program yang mengarah kepada upaya peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan berbasis Kompetensi.

**Tabel 2.7**  
**Data Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPT BLK Sekayu**  
**Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2021**

No	Kejuruan	Tahun					Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Perakitan Komputer	16	-	32	16	16	80
2	Komputer Operator	32	-	80	36	-	148
3	Menjahit	16	32	48	16	-	112
4	Kecantikan Rambut	16	32	48	16	16	128
5	Penerangan	-	16	-	-	16	32
6	Penerangan MTU	-	32	-	-	-	32
7	Sepeda Motor MTU	-	16	-	-	-	16
8	Sepeda Motor	-	16	-	-	-	16
9	Pengelasan 2F MTU	-	32	-	-	-	32
10	Pengelasan SMAW 1G	-	-	16	16	-	32
11	Pengelasan SMAW 3G	-	16	16	-	-	32
12	Basic Office Computer	-	64	-	-	-	64
13	Teknisi Komputer	-	32	-	-	-	32
14	Multimedia	-	-	-	-	16	16
15	Pipe Fitter	-	-	-	-	13	13
	<b>Jumlah</b>	<b>80</b>	<b>288</b>	<b>240</b>	<b>100</b>	<b>77</b>	<b>785</b>

Sumber : Bidang Pelatihan dan Produktifitas

2) Pelayanan dalam rangka Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Bagi Calon Tenaga Kerja

Pelayanan penempatan dimulai dari Ketersediaan data Informasi Pasar Kerja yang meliputi jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten Musi Banyuasin lowongan yang ada serta penempatannya. Dari Data tersebut dapat mendapatkan pekerjaan formal. Selain itu kegiatan-kegiatan yang bermuara pada perluasan kesempatan kerja. Kegiatan yang telah dianggarkan selama 2017-2021 adalah sebagai berikut :

a) Penyebaran Informasi Bursa Tenaga Kerja

Penyebaran informasi ini dimaksud agar para pencari kerja mengetahui segala sesuatu yang harus dipersiapkan sebelum memasuki dunia kerja dan mengetahui informasi tentang dunia kerja. Misalnya membuat lamaran kerja, kita menghadapi wawancara, informasi pendaftaran pencari kerja Kabupaten, dan lain-lain. Beberapa data yang berkaitan dengan keadaan pencari kerja dan penempatannya disajikan dalam tabel-tabel dibawah ini :

**Tabel.2.8**  
**Pencari Kerja Terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi**  
**Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 s.d 2021**

No	PD Kabupaten	Tahun Penyelenggaraan					Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin	1.263	990	885	494	1980	

*Sumber : Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja*





Keadaan Pencari Kerja pada tahun 2017 s.d 2021 cukup Fluktuatif pada.

**Tabel.2.9**  
**Pencari Kerja di Tempatkan di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi**  
**Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 s.d 2021**

No	PD Kabupaten	Tahun Penyelenggaraan					Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin	368	320	146	191	805	

Sumber : Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja

**Tabel.2.10**  
**Bursa Kerja Terdaftar Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi**  
**Kabupaten Musi Banyuasin 2021**

No	PERUSAHAAN	KEBUTUHAN
1	PERTAMINA RAMBA	30 Orang
2	PT. BANYUASIN AGRO MANDIRI	46 Orang
3	PT. BARA PERMATA MINING	87 Orang
4	PT. BRI Tbk	2 Orang
5	PT. MUSI BANYUASIN INDAH	7 Orang
6	PT. SAMPOERNATELEKOMUNIKASI/NET1	7 Orang
7	PT. DSSP POWER SUMSEL	8 Orang
8	PT. ORYX SERVICE	3 Orang
9	PT. FIRST SECURITY	6 Orang
10	PT. ELNUSA	2 Orang
11	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	20 Orang
12	PT. GUNA TESUMA INDONESIA	38 Orang
13	PT. HINDOLI	65 Orang
14	PT. PANCA AGUNG SEJATI	4 Orang
15	PT. KIRANA MUSI PERSADA	3 Orang
16	PT. GAMMA BUANA PERSADA	1 Orang
17	PT. SAHABAT MANDIRI KSATRIA	1 Orang
18	PT. PANCA AGUNG SEJATI	34 Orang
19	PT. ASTRA INT Tbk	1 Orang
20	PT. BENGKALIS KUDA LAUT	66 Orang
21	PT. NAWAKARA PERKASA NUSANTARA	53 Orang
22	PT. GOBEL DHARMA SARANA KARYA	86 Orang
23	PT. ORYX SERVICE	3 Orang
24	ATALIAN GLOBAL SERVICES	50 Orang
25	PT. BRI CAB. SEKAYU	2 Orang
26	PT. ORYX SERVICE	1 Orang



27	PT. INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY	6 Orang
28	PT. MUBA ELEKTRIK POWER	4 Orang
29	PT. MEDCO	2 Orang
30	PT. ORYX SERVICE	6 Orang
31	PT. ORYX SERVICE	1 Orang
32	PT. KIRANA MUSI PERSADA	2 Orang
33	BKK SMKN 1 SEKAYU	42 Orang
34	BKK SMKN 1 LAIS	25 Orang
35	PT. IWIP TERNATE	8 Orang
36	PENCAKER MELAPOR	48 Orang
37	BKK SMKN 3 SEKAYU	37 Orang
<b>JUMLAH .....</b>		<b>805 Orang</b>

3) Pelayanan dalam Rangka Pembinaan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat, meliputi :

a. Penyelesaian Kasus

Kasus yang berhasil diselesaikan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang masuk dan kasus yang diselesaikan sebanyak :

**Tabel.2.11**  
**Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama**  
**Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus yang tercatat</b>	<b>Kasus Yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama</b>
<b>2017</b>	27 Kasus	8 Kasus
<b>2018</b>	28 Kasus	2 Kasus
<b>2019</b>	24 Kasus	8 Kasus
<b>2020</b>	50 Kasus	10 Kasus
<b>2021</b>	38 Kasus	4 Kasus

*Sumber : Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja*

b. Penetapan Upah Minimum Kabupaten

Perkembangan Upah Minimum Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Perbandingan antara UMK dengan KHL rata-rata diatas 90% yang artinya UMK sudah mendekati Kebutuhan Hidup Layak. Perkembangan UMK dan KHL tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel.2.12**  
**Data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK)**  
**Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 s.d 2021**

<b>Tahun</b>	<b>UMK (Rp)</b>	<b>KHL (Rp)</b>	<b>UMK / KHL (%)</b>
<b>2017</b>	2.469.550	2.283.914	108,1 %
<b>2018</b>	2.684.650	2.447.619	110 %
<b>2019</b>	2.900.227	2.465.310	117,64%
<b>2020</b>	3.147.036	2.957.700	106,40%
<b>2021</b>	3.251.832	3.081.059	105,54%

*Sumber : Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja*

Dewan Pengupahan Kabupaten Musi Banyuasin mulai mengusulkan penetapan UMK sejak tahun 2015, langkah tersebut diambil dengan pertimbangan :

1. Mengacu pada Ketentuan PP 78 Tahun 2015
2. Adanya desakan dari elemen pekerja melalui serikat pekerja
3. Angka KHL dan kemampuan perusahaan masing-masing daerah dalam provinsi Sumsel berbeda.

## **2. BIDANG KETRANSMIGRASIAN**

Dalam rangka pembangunan Ketrasmigrasian dilaksanakan melalui Program-program Kegiatan sesuai dengan rencana lima tahun (Renstra). Adapun capaian Kinerja dari Program Kegiatan tersebut menunjukkan tingkat Keberhasilan yang cukup Signifikan. Argumentasi ini didasarkan hasil penilaian kinerja melalui LAKIP kurun waktu 2012-2016 tersebut merujukkan capaian Kinerja 100% terhadap program Ketrasmigrasian, dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**Tabel.2.13**  
**Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang terbina**  
**Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 s.d 2021**

Tahun	Jumlah UPT Yang Ada	Jumlah UPT yang dibina	%
2017	1 UPT	1 UPT	100
2018	1 UPT	1 UPT	100
2019	1 UPT	1 UPT	100
2020	1 UPT	1 UPT	100
2021	1 UPT	1 UPT	100

Sumber : Bidang Penyiapan Pembangunan Permukiman dan Pengembangan Transmigrasi

**Tabel.2.14**  
**Jumlah Transmigran yang terbina**  
**Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 s.d 2021**

Tahun	Jumlah KK yang dibina	Keterangan
2017	185 KK	1 UPT
2018	185 KK	1 UPT
2019	185 KK	1 UPT
2020	185 KK	1 UPT
2021	185 KK	1 UPT

## **B. Permasalahan dan Hambatan yang di hadapi dalam menyelenggaraan Tusi PD**

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

### **1. Peningkatan Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja**

#### **1.1. Kualitas Tenaga Kerja relatif rendah**

Kualitas tenaga kerja yang rendah ini disebabkan karena tingkat pendidikan penduduk yang rendah pula atau belum memadai dengan jenis pekerjaan yang tersedia. Rendahnya kualitas tenaga kerja akan berpengaruh pada tingkat

produktivitas yang ujung-ujungnya menyebabkan proses produksi yang tidak efisien. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa produk lokal yang tidak mampu bersaing dengan produk luar terutama barang-barang yang dihasilkan negara-negara maju. Bukan karena sedikitnya modal yang disediakan dalam proses produksi, justru sebaliknya biaya produksi tinggi tetapi hasil produksi rendah.

**Tabel 2.14  
Data Penduduk yang bekerja di Kab. Musi Banyuasin Tahun 2017-2021**

NO	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Penduduk yang Bekerja	290.745	283.386	290.744	317.868	318.096
2.	Pengangguran Terbuka	8.212	9.643	12.573	15.986	13.230

## 1.2 Belum Maksimal Keberadaan Balai Latihan Kerja

BLK memainkan peran signifikan dalam menyiapkan tenaga kerja terampil dan siap pakai. Berbagai program dan pelatihan diadakan di BLK dengan harapan dapat membantu para pencari kerja agar dapat terserap di pasar kerja atau menciptakan lapangan kerja sendiri (wirausaha). Namun kondisi yang sekarang dihadapi oleh BLK adalah ;

- Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelatihan keterampilan, Lulusan BLK belum seluruhnya dapat ditempatkan. Lulusan dengan kualitas rendah ini disebabkan fasilitas pelatihan yang kurang memadai dari segi kualitas dan kuantitas, yang berimbas pada pelaksanaan program. Perlu peningkatan sarana dan prasarana latihan serta program-program yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Terbatasnya tenaga fungsional Instruktur dan kompetensi Instruktur masih rendah (perlu *upgrading* sesuai dengan kebutuhan pasar kerja).

## 2. Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja

### 2.1. Masih Besarnya Angka Pengangguran

Muara dari Permasalahan Ketenagakerjaan salah satunya adalah semakin tinggi tingkat pengangguran. Apalagi tingginya tingkat pengangguran ini semakin

diperparah dengan adanya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). PHK yang dilakukan untuk efisiensi perusahaan. Pengangguran ini akan berakibat luas dalam prespektif pembangunan ekonomi negara. Banyaknya jumlah pengangguran merupakan faktor penghambat pembangunan ekonomi negara dan pemicu terganggunya stabilitas sosial dan politik.

**Tabel 2.15  
Data Penganggur Kab. Musi Banyuasin 2017-2021**

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengangguran (Orang)	8.212	9.643	12.573	15.986	13.230

Data yang ada menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penganggur, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pengangguran menjadi permasalahan utama ketenagakerjaan yang harus menjadi perhatian kita bersama untuk dicarikan jalan keluarnya.

## 2.2. Jumlah Angkatan Kerja yang Besar

Besarnya angkatan kerja yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin tidak mampu diserap semua oleh kesempatan kerja yang ada, karena tidak berimbang jumlah angkatan kerja yang ada dengan ketersediaan kesempatan kerja. Hal ini merupakan pokok penyebab terhambatnya penyelenggaraan pembangunan ekonomi. Kondisi Angkatan Kerja dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.16  
Angkatan Kerja Kab. Musi Banyuasin 2017-2021**

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,43	65,38	66,35	70,61	69,18
2	Angka Angkatan Kerja (Orang)	298.957	293.029	303.317	333.854	331.326

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Angkatan kerja dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan yang berarti terhadap penyerapan tenaga kerja karena kesempatan kerja yang ada tidak sebanding atau lebih kecil dari jumlah angkatan kerja yang ada.

### 2.3. Ketidak seimbangan antara persediaan dan kebutuhan tenaga kerja (kesempatan kerja)

Salah satu masalah yang dihadapi Kabupaten Musi Banyuasin adalah dualisme dalam pasar tenaga kerja. Disatu pihak terdapat kelebihan persediaan, dilain pihak terdapat kelebihan kebutuhan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan memproduksi pencari kerja. Kelebihan persediaan tenaga kerja biasanya terjadi di pasar kerja dengan mutu modal manusia yang rendah. Tenaga Kerja yang memiliki Pendidikan dan Produktifitas rendah tidak dapat mengisi tempat/ pekerjaan yang memiliki Pendidikan dan Produktifitas Tinggi.

**Tabel 2.17**  
**Data Pencari Kerja dan Tenaga Kerja yang ditempatkan**  
**di Kab. Musi Banyuasin Tahun 2017-2021**

NO	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pencari Kerja yang terdaftar	1.263	990	885	494	1980
2.	Pencari Kerja ditempatkan	368	320	146	191	805

Ini menunjukkan bahwa Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Musi Banyuasin sangat Rendah bahkan penempatan tenaga kerja masih dibawah 50% dari total pencari kerja.

## 3. Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja

### 3.1. Tingginya Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Perusahaan

Penyebab tingginya angka perselisihan hubungan industrial di Perusahaan dalam wilayah Kabupaten Muasi Banyuasin, adalah :

- Kurang patuhnya manajemen perusahaan dalam menerapkan aturan ketenagakerjaan.



- Ketidak pahamnya pekerja terhadap aturan ketenagakerjaan
- Tidak sinkronya pemahaman pengusaha dan pekerja terhadap tujuan dibentuknya serikat pekerja.
- Belum dianggap pentingnya pembentukan dan peranan LKS Bipartit di Tingkat Perusahaan.
- Kurangnya Kesadaran Pekerja untuk memanfaatkan LKS Bipartit dalam upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

#### **4. Pengembangan Kawasan Transmigrasi.**

Permasalahan urusan Ketransmigrasian di Kabupaten Musi Banyuasin adalah;

- lahan usaha Transmigrasi yang tumpang tindih dengan perusahaan Perkebunan (Investor)
- terisolirnya daerah transmigrasi dikarenakan sarana infrastruktur yang kurang memadai.
- Lahan Transmigrasi masih kurang
- Masih Terdapat beberapa lokasi termasuk lokasi dalam HPK yang perlu dilepaskan oleh Menteri Kehutanan.
- Masih terdapat kekurangan sertifikat lahan transmigrasi.
- Beberapa wilayah Unit Pemukiman Transmigrasi termasuk dataran rendah sehingga sering terkena bencana banjir.

#### **C. Dampak Terhadap Pencapaian Tujuan Sasaran PD, Kabupaten, dan Capaian Program Nasional**

##### **Tujuan PD :**

1. Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Mendorong Perluasan Kesempatan Kerja Serta mewujudkan Hubungan Kerja yang harmonis.

##### **Sasaran 1**

Menurunnya Angka Pengangguran

##### **Indikator Sasaran**

- a. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka



**Sasaran 2**

Meningkatnya Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja

**Indikator Sasaran**

Menurunnya Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja

2. Meningkatnya Pelayanan Taraf Hidup Masyarakat Transmigrasi

**Sasaran 1**

Meningkatnya Pembinaan Ketransmigrasian yang berkualitas

**Indikator Sasaran**

Persentase Pelayanan dan Taraf Hidup Masyarakat Transmigrasi

3. Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

**Sasaran 1**

Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

**Indikator Sasaran**

Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Dilihat dari Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin, ini sangat jelas capaian hasil Indikator setiap sasaran akan mempengaruhi tercapainya tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Indikator Tujuan Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka.

**D. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Muba**

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 merupakan perencanaan yang disusun berdasarkan kondisi lingkungan (Evidence Based) dan perubahan yang terjadi melalui suatu analisis terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan karakteristik perangkat daerah. Sebagaimana diketahui bahwa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang meliputi lingkungan internal dan eksternal. Kondisi lingkungan tersebut akan memberikan kekuatan dan kelemahan bagi organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi jalannya

organisasi dalam bentuk peluang dan ancaman. Apabila kondisi lingkungan tersebut tidak bisa dikenali dan diidentifikasi secara baik oleh organisasi, maka akan berakibat fatal terhadap kelangsungan organisasi tersebut. Oleh karena pengaruh dan akibat yang ditimbulkan begitu besar, maka menjadi penting bagi pimpinan organisasi dan segenap jajarannya untuk secara intens memantau dan mengikuti perubahan di lingkungan yang terjadi. Hal ini perlu diupayakan agar organisasi mampu menjawab setiap perubahan yang menjadi ancaman / tantangan organisasi. Dengan demikian, organisasi dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin akan tetap eksis dan mampu mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian secara optimal. Analisis lingkungan yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan metode “Analisis SWOT” (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats). Analisis SWOT ini secara efektif sangat membantu Dinas dengan melakukan analisa lingkungan internal dan eksternal. Adapun empat unsur strengths, weakness, opportunities, threats yang terangkum dalam lingkungan internal dan eksternal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin dapat diidentifikasi sebagai berikut :

### **Lingkungan Internal**

Faktor-faktor Lingkungan internal adalah segala sesuatu yang ada didalam organisasi yang secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan organisasi. Faktor Lingkungan internal terdiri dari aspek operasional yang meliputi sistem dan prosedur kerja, fungsi manajemen, sarana dan prasarana, system informasi manajemen, keuangan serta teknologi yang diperlukan dan dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin. Faktor Internal akan memberikan kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness) pada organisasi.

### **Lingkungan Eksternal**

Merupakan faktor-faktor di luar Organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan organisasi yang meliputi aspek ekonomi, social budaya, keamanan dan teknologi. Faktor eksternal inilah yang akan memberikan “peluang” (opportunities) tapi juga memunculkan “tantangan” (threats).

Adapun hasil indentifikasi faktor Internal di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuain adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.18**
**Ringkasan Matriks SWOT**

<b>Faktor-faktor Strategi Eksternal</b>	<b>Faktor-faktor Strategi Internal</b>
<p><b>Peluang (<i>Opportunity</i>)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaruh Globalisasi, akan memperluas kesempatan kerja Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri</li> <li>2. Kondisi yang kondusif di bidang ketenagakerjaan akan menarik minat para investor</li> <li>3. Adanya potensi Sumber Daya Alam</li> <li>4. Pelaksanaan Otonomi Daerah</li> <li>5. Sistem Bursa Kerja <i>On Line</i> mempercepat arus informasi ketenagakerjaan</li> <li>6. Tersedianya lokasi transmigrasi yang sudah di RKS KP/RTSP.</li> <li>7. Tingginya minat masyarakat untuk menjadi transmigran</li> </ol>	<p><b>Kekuatan (<i>Strength</i>)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang mendukung</li> <li>2. Jumlah angkatan kerja yang besar yang apabila dikelola dengan baik akan merupakan modal dasar pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian</li> <li>3. Adanya Lembaga Kemitraan Ketenagakerjaan</li> <li>4. Adanya SDM/ Aparatur yang memadai bidang Ketenagakerjaan &amp; ketransmigrasian</li> <li>5. Adanya Potensi calon lokal transmigrasi yang cukup besar serta ketersediaan lahan yang potensial.</li> </ol>
<p><b>Ancaman (<i>Treat</i>)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meskipun di satu sisi globalisasi merupakan peluang, namun disisi lain juga merupakan ancaman yang harus diantisipasi dengan mempersiapkan SDM yang berkualitas dan produktivitas</li> <li>2. Perubahan dunia kerja dari sektor pertanian berkembang kearah agrobisnis akan lebih menggunakan teknologi yang padat modal daripada padat karya.</li> <li>3. Menonjolnya isu HAM, demokrasi dan lingkungan hidup di bidang ketenagakerjaan</li> <li>4. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di lokasi transmigrasi, belum sesuai dan memadai kualitasnya.</li> <li>5. Tuntutan Masyarakat <i>clean and good govenance</i></li> </ol>	<p><b>Kelemahan (<i>weakness</i>)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan angkatan kerja yang lebih besar dari pada pertumbuhan kesempatan kerja</li> <li>2. Rendahnya kualitas angkatan kerja</li> <li>3. Kualitas TKI masih dominan berpendidikan SLTA sehingga hanya mampu masuk pasar kerja dengan jabatan setingkat operator</li> <li>4. Sistem informasi ketenagakerjaan yang belum memadai</li> <li>5. Ketidaklayakan dalam hubungan/lingkungan kerja</li> <li>6. Upah sebagian tenaga kerja yang belum sesuai untuk memenuhi kebutuhan KHL</li> <li>7. Penerimaan pegawai berdasarkan sistim <i>Outsourcing</i>.</li> <li>8. Kurangnya kuantitas dan kualitas pegawai teknis ketenagakerjaan.</li> <li>9. Sarana dan prasarana dilokasi transmigrasi belum cukup tersedia/kurang baik</li> <li>10. Terbatasnya Tenaga IT</li> <li>11. Revitalisasi BLK Belum berjalan secara optimal</li> </ol>

## E. ISU-ISU PENTING

Isu-Isu Penting yang menjadi Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian :

1. Penciptaan Lapangan Kerja yang seluasnya dalam menghadapi perubahan dunia kerja.
2. Peningkatan Kompetensi Pencari Kerja yang siap pakai.
3. Peningkatan Kompetensi dan Kewirausahaan bagi penyandang disabilitas
4. Perlindungan Tenaga Kerja yang adaptif dan inklusif dalam merespon dunia kerja yang sering berubah.
5. Kemandirian dan peningkatan pembinaan ketransmigrasian yang berkualitas.

### 2.4. Penelaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Pada Tahun anggaran 2023 Usulan Program Kegiatan Berdasarkan Rancangan Awal RPD Tahun 2023 sebagai Berikut :

#### a. Rancangan Awal RPD

Pada rancangan awal RPD Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin usulan pagu Anggaran Rp. 45.675.834.700,- terdiri dari:

1. Program Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 18.346.259.700 terdiri dari 8 Kegiatan 22 Sub Kegiatan.
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja Rp. 700.000.000 terdiri dari 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan.
3. Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Rp. 11.150.000.000 terdiri dari 4 kegiatan 4 Sub kegiatan.
4. Program Penempatan Tenaga Kerja Rp.1.963.975.000 terdiri dari 2 Sub kegiatan 4 Sub Kegiatan.
5. Program Hubungan Industrial Rp. 1.605.000.000 terdiri dari 2 kegiatan 3 sub kegiatan.
6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Rp. 1.710.600.000 terdiri dari 1 Kegiatan 1 sub kegiatan.
7. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp. 200.000.000 terdiri dari 1 Kegiatan 1 Sub Kegiatan.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel Review Terhadap rancangan Awal RPD Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

**Tabel 2.6**  
**TABEL TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD DAN ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2023**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>18.346.259.700</b>	I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>8.277.249.620</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>50.022.000</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>59.560.000</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	25.011.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	39.610.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	25.011.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	19.950.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>6.040.578.700</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>5.867.917.567</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 org/Bln	6.040.578.700		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 org/Bln	5.867.917.567	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>				<b>26.385.000</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>				<b>26.385.000</b>	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	26.385.000		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	26.385.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>345.555.000</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>73.125.000</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	70.000.000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	30.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	82.815.000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	43.125.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Orang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	192.740.000		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Orang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.224.889.000</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.010.414.403</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	192.740.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	19.997.286	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	127.564.974	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	80.100.000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	49.667.731	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	180.600.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	135.026.283	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	233.222.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	104.322.129	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2 Dokumen	25.000.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2 Dokumen	24.960.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.962.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	504.227.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	537.914.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>1.400.000.000</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	600.000.000		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	-	-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Pengadaan Mebel	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3 Unit	600.000.000		Pengadaan Mebel	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	-	-	
	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	4 Unit	200.000.000		Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	-	-	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1.071.400.000</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>737.858.740</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	300.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	333.658.740	
	Penyediaan Jasa Pelatanaan Umum Kantor	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	771.400.000		Penyediaan Jasa Pelatanaan Umum Kantor	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	404.200.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>8.187.430.000</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>501.988.910</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Terperuhnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	4 Unit	149.290.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Terperuhnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	4 Unit	113.210.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Terperuhnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	4 Unit	8.000.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Terperuhnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	4 Unit	361.838.910	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Terperuhnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	17 Unit	38.140.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Terperuhnya Pemeliharaan Barang Mitik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	17 Unit	26.940.000	
	<b>PROGRAM PERENCANANA TENAGA KERJA</b>				<b>700.000.000</b>		<b>PROGRAM PERENCANANA TENAGA KERJA</b>				<b>404.578.100</b>	
	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>				<b>700.000.000</b>		<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>				<b>404.578.100</b>	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Muba	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	480.000.000		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Muba	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	404.578.100	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Muba	Jumlah Perusahaan Yang Menyusun RTK Mikro	30 Perusahaan	220.000.000		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Muba	Jumlah Perusahaan Yang Menyusun RTK Mikro	-	-	
	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>				<b>11.150.000.000</b>		<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>				<b>6.769.762.000</b>	
	<b>Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>				<b>10.500.000.000</b>		<b>Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>				<b>6.769.762.000</b>	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	200 orang	10.000.000.000		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	52 orang	6.769.762.000	
									Tersedianya Makanan dan Minum Rapat	30 Kali		
									Tersedianya Seragam Panitia Kegiatan	50 Stel		
									Terselenggaranya Konsultasi dan Koordinasi dengan SKK Migas	1 Kegiatan		
									Terselenggaranya Konsultasi dan Koordinsi Kedaireka	1 Kegiatan		
									Terselenggaranya Konsultasi dan Koordinasi Pelatihan	1 Kegiatan		
									Terselenggaranya pendampingan BPKP dan Inspektorat	2 Kegiatan		
									Terselenggaranya Program Pemagangan Peserta Pelatihan	52 orang		
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Kesepakatan / Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pada Tahun n	2 Lembaga	250.000.000		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Kesepakatan / Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pada Tahun n	-	-	
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	4 Unit	250.000.000		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	0	-	
	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>				<b>200.000.000</b>		<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>				<b>-</b>	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	15 Lembaga	200.000.000		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	-	-	

NO	RANCANGAN AWAL RPKD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	<b>Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil</b>				200.000.000	<b>Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil</b>				-		
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan	200.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	-	-		
	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten /Kota</b>				250.000.000	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten /Kota</b>				-		
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 Dokumen	250.000.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	-	-		
	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>				1.963.975.000	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>					856.057.000	
	<b>Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>				500.000.000	<b>Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>					227.484.000	
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapat Fasilitas Layanan ULD	50 orang	500.000.000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapat Fasilitas Layanan ULD	50 orang	227.484.000		
	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>				1.463.975.000	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>					628.573.000	
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja online	1 Dokumen	134.000.000	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja online	1 Dokumen	134.320.000		
								Pengembangan Website Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Muba	1 Dokumen			
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1850 orang	429.975.000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Bursa Tenaga Kerja Khusus	24 Unit BKK	494.253.000		
								Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1850 orang			
								Laporan Keberadaan Tenaga Kerja Asing	15 perusahaan			
								Rekrutmen / Job Canvasing	10 Kali			
	Job Fair/ Bursa Kerja	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan melalui Job Fair / Bursa Kerja	2000 orang	900.000.000	Job Fair/ Bursa Kerja	Kec. Sekayu Kel. Serasan Jaya	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan melalui Job Fair / Bursa Kerja	-	-		
	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>				1.605.000.000	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>					1.328.810.000	
	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 daerah</b>				860.000.000	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 daerah</b>					779.405.000	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan	5 Laporan	860.000.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Musi Banyuasin	Dokumen Pencatatan PKB	10 Dokumen	779.405.000		
								Dokumen Pengesahan Peraturan Perusahaan	10 Dokumen			
								Dokumen Rekomendasi UMK	1 Dokumen			
								FGD Ketenagakerjaan (Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan dan KSB dan PKS)	1 Dokumen			
								Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai	1 Laporan			
								Jumlah Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan	7000 orang			
	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota</b>				745.000.000	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota</b>					549.405.000	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	35 Perkara	395.000.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	35 Perkara	378.010.000		

NO	RANCANGAN AWAL RKP					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
								Terselesainya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen			
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	50 Lembaga	350.000.000		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah LKS Bipartit yang dibina dan Terbentuk	16 Lembaga	171.395.000	
									Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga		
											-	
											-	
	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>				<b>1.910.600.000</b>		<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>				<b>149.271.200</b>	
	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1(satu) Daerah kabupaten /Kota				<b>1.710.600.000</b>		Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1(satu) Daerah kabupaten /Kota				<b>149.271.200</b>	
	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi penduduk Setempat dan Transmigran	Kec. Sanga Desa Kab. Muba	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen	1.710.600.000		Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi penduduk Setempat dan Transmigran	Kec. Sanga Desa Kab. Muba	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen	149.271.200	
											-	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>				<b>200.000.000</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>				<b>-</b>	
	Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian				200.000.000		Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian				-	
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Kec. Sanga Desa Kab. Muba	Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman	200.000.000		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Kec. Sanga Desa Kab. Muba	-	-	-	
	<b>TOTAL</b>				<b>35.675.834.700</b>		<b>TOTAL</b>				<b>17.785.727.920</b>	



Berdasarkan Analisis Kebutuhan Program kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2023.

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, didukung oleh 2 Sub Kegiatan :
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indicator capaian jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 4 dokumen dengan anggaran Rp.39.610.000,-
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indicator capaian Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 4 laporan dengan anggaran Rp. 19.950.000,-
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, didukung oleh 1 sub kegiatan :
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 47 orang dengan anggaran Rp. 5.867.917.567,-
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, didukung 1 Sub Kegiatan;
  - 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD indicator capaian Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD / premi asuransi kendaraan dinas roda empat sebanyak 1 dokumen dengan anggaran Rp. 26.385.000,-
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya bagi ASN Disnakertrans sebanyak 1 paket dengan anggaran Rp. 30.000.000,-
  - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan diklat Pim III bagi Pejabat Disnakertrans sebanyak 3 orang dengan anggaran Rp. 43.125.000,-
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan sebanyak 1 paket dengan anggaran Rp.19.997.286,-



- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan sebanyak 1 paket dengan anggaran Rp. 127.564.974.
  - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 1 paket dengan anggaran Rp. 49.667.731,-
  - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan sebanyak 1 paket dengan anggaran Rp. 135.026.283,-
  - 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan Indikator Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan sebanyak 2 dokumen dengan anggaran Rp. 104.322.129,-
  - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, indicator Jumlah Dokumen Bacaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan sebanyak 2 dokumen dengan anggaran Rp. 24.960.000,-
  - 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu sebanyak 12 Laporan dengan anggaran Rp. 10.962.000,-
  - 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Indikator capaian Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 Laporan dengan anggaran Rp. 537.914.000,-
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, didukung 2 sub kegiatan;
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Capaian Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan sebanyak 12 Laporan dengan anggaran Rp. 333.658.740,-
  - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan sebanyak 12 laporan. Untuk tenaga kontrak (operator computer, kebersihan, sopir, pramusaji/resepsionis, dan jaga malam hanya dianggarkan sebanyak 6 bulan) dan menunggu kebijakan selanjutnya pada Tahun 2023 bagi tenaga kontrak di Kabupaten Musi Banyuasin dengan anggaran Rp. 404.200.000,-
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, didukung 3 sub kegiatan sebagai berikut ;
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dengan indicator capaian jumlah



kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan sebanyak 4 unit, dengan anggaran Rp. 113.210.000,-

- 2) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 4 unit dengan anggaran Rp. 361.838.910,-
- 3) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya indicator Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi sebanyak 17 unit dengan anggaran Rp. 26.940.000,-

## **2. Program Perencanaan Tenaga Kerja**

### **a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**

#### **1) Penyusunan Rencana Tenaga Makro dengan Indikator kinerja ;**

- Jumlah dokumen Penyusunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 1 Dokumen
  - Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen
- Dengan anggaran Rp. 404.578.100,-

## **3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**

### **a. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**

#### **1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, indicator kegiatan :**

- Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n sebanyak 52 orang.
  - Tersedianya makan minum rapat sebanyak 30 kali
  - Tersedianya seragam panitia kegiatan 50 stel
  - Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi dengan SKK Migas 1 Kegiatan
  - Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi Kedaireka 1 Kegiatan
  - Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi pelatihan 1 kegiatan
  - Terselenggaranya Pendampingan BPKP dan Inspektorat 2 Kegiatan
  - Terselenggaranya program pemagangan peserta pelatihan 52 orang
- Dengan anggaran sebesar Rp. 6.769.762.000,-



#### **4. Program Penempatan Tenaga Kerja**

##### **a. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota**

1. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan dengan indicator Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapat Fasilitas Layanan ULD sebanyak 50 orang anggaran Rp. 227.484.000

##### **b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**

1. Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online, dengan indicator capaian :

- Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online sebanyak 1 dokumen
- Pengembangan Website Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 1 dokumen.

Dengan anggaran sebesar Rp. 134.320.00,-

2. Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online, dengan indicator capaian;

- BursaTenaga Kerja Khusus sebanyak 24 Unit BKK
- Jumlah Pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui system online (Karir Hub) sebanyak 1850 orang.
- Laporan Keberadaan Tenaga Kerja Asing sebanyak 15 Perusahaan
- Rekrutmen/ Job Canvasing sebanyak 10 kali.

Dengan anggaran sebesar Rp. 494.253.000.

#### **6. Program Hubungan Industrial**

##### **a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.**

1. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan, dengan indicator :

- Dokumen Pencatatan PKB sebanyak 10 Dokumen
- Dokumen Pengesahan Peraturan Perusahaan 10 dokumen
- Dokumen Rekomendasi UMK sebanyak 1 Dokumen
- FGD Ketenagakerjaan (Sosialiasi BPJS Ketenagakerjaan dan KSB dan PKS). 1 Dokumen.



- Sarana HI (PP/PKB Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan jumlah pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 7000 orang.

Dengan anggaran Rp. 779.405.000,-

b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota

1. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten / kota, dengan indicator :

- Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan 35 Perkara.
- Terelesainya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota sebanyak 1 Dokumen.

Anggaran sebesar Rp. 378.010.000,-

2. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota, dengan indicator:

- Jumlah LKS Bipartit yang dibina dan terbentuk sebanyak 16 Lembaga.
- Jumlah LKS Tripartit yang dibina sebanyak 1 Lembaga

Dengan anggaran sebesar Rp. 171.395.000,-

## 5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Penataan Pesebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

1. Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran dengan indicator jumlah pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman Transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang) sebanyak 1 dokumen dengan anggaran Rp. 149.271.200,-

Berdasarkan analisis Kebutuhan Program Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 17.785.727.920,-

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Tahun anggaran 2023 Usulan Program Kegiatan dan Kegiatan usulan dari masyarakat Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin

Tabel 2.20

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kegiatan Tahun 2023  
Kabupaten Musi Banyuasin

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Muba

No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
--- NIHIL ---					



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

#### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 296 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin.

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam unsur pelaksanaan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan kewenangannya, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja.
3. Penciptaan Hubungan Industrial yang harmonis dan memperbaiki Iklim Ketenagakerjaan.
4. Peningkatan Perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan.
5. Memperkuat fungsi pendukung (manajemen dan pengawasan internal, serta perencanaan dan pengembangan).

Merujuk juga Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 sebagai Berikut :

1. Peningkatan Konektivitas Intra dan Antar Perdesaan
2. Peningkatan Kapasitas Sistem, Kelembagaan dan Sumberdaya manusia perdesaan yang unggul.
3. Peningkatan Investasi produk unggulan perdesaan.
4. Pengembangan teknologi tepat guna dan teknologi digital.
5. Peningkatan Keberlanjutan Pembangunan Perdesaan berwawasan lingkungan
6. Peningkatan dan pemanfaatan modal social budaya untuk pembangunan perdesaan.

Hal ini keterkaitan dengan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dalam rangka :

1. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka
2. Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja.
3. Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja.
5. Menurunnya Angka Sengketa Pekerja dan Perusahaan di Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Meningkatnya Pelayanan dan Taraf Hidup Masyarakat Transmigrasi.
7. Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN SKPD**

#### **A. Tujuan**

Tujuan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahunan. Dalam mencapai Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Mendorong Perluasan Kesempatan Kerja serta mewujudkan hubungan kerja yang harmonis.
- b. Meningkatnya Pelayanan dan Taraf Hidup Masyarakat Transmigrasi.
- c. Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian .



Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran didukung oleh ketentuan-ketentuan maupun arahan dari pengambil keputusan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan

**Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>TARGET SASARAN TAHUN 2023</b>
1.	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Mendorong Perluasan Kesempatan Kerja Serta Mewujudkan Hubungan Kerja yang harmonis	Menurunnya Angka Pengangguran	1. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	52
		Menurunnya Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja	2. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,8%
			3. Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja Pertahun	7,8%
2.	Meningkatnya Pelayanan Taraf Hidup Masyarakat Transmigrasi	Meningkatnya Pembinaan Ketransmigrasian yang berkualitas	4.	100%
3.	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	5. Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	100%

Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah:



## A. Kebijakan Internal

Kebijakan internal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengelola pelaksanaan program-program di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yaitu :

1. Sinkronisasi dan integrasi program ketenagakerjaan dengan perluasan kesejahteraan dan produktifitas tenaga kerja melalui :
  - Peningkatan pembentukan dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, efisien dan berjiwa wirausaha sehingga bukan saja untuk dirinya sendiri akan tetapi dapat menarik dan menyerap tenaga kerja lainnya.
  - Pengadaan tenaga kerja yang semakin berkualitas dan mampu meningkatkan daya saing merupakan bagian dari perwujudan kebijaksanaan dan pelaksanaan tenaga kerja, yang sekaligus mendorong pemerataan tenaga kerja. Kesempatan kerja mempedomani angkatan kerja yang ada.
  - Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan formal, pelatihan kerja dan pengembangan produktifitas di tempat kerja, sebagai suatu kesatuan pengembangan SDM yang menyeluruh dan terpadu. Dan pelatihan merupakan bagian integral dalam pengembangan SDM. Oleh karena itu haruslah bersifat fleksibel yang mengacu dan berorientasi pada perubahan unit kerja.
  - Peningkatan peran serta masarakat dalam kegiatan pelatihan antara lain melalui Balai Latihan Kerja (BLK) terus menerus dikembangkan baik system formal maupun nonformal.
  - Pendayagunaan tenaga kerja produktif di berbagai sektor perlu di dukung oleh system informasi tenaga kerja yang memadai melalui kegiatan bursa kerja terpadu.
  - Peningkatan perluasan kesempatan kerja.
2. Peningkatan Harmonisasi Hubungan kerja melalui :
  - Pengembangan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja wanita dan anak dilindungi terhadap perlakuan diskriminatif, serta terlindung dari gangguan harkat martabat dan kodratnya.
  - Peningkatan fungsi kelembagaan tersebut seperti organisasi buruh / pekerja, organisasi pengusaha LKS, Tripartit Dewan Pengupahan, LKS Bipartite dan P2K3.



- Pembentukan dan peningkatan peran P2K3, peningkatan syarat kerja, mengembangkan Perjanjian Kerja Bersama.
  - Peningkatan tahap hidup dan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga melalui pengupahan dan upah minimum setara dengan nilai kebutuhan hidup yang layak (KHL) serta ditunjang dengan upaya peningkatan produktivitas pekerja.
  - Penanganan perselisihan, unjuk rasa dan mogok kerja sejauh mungkin dapat diselesaikan serta kedua belah pihak dalam wadah LKS Bipartit yang selanjutnya apabila tidak terselesaikan perselisihan maka dilanjutkan dengan menempuh melalui proses hukum yang berlaku dan yang paling utama adalah lebih berkeadilan.
3. Ketransmigrasian :
- Penempatan calon transmigrasi dilaksanakan melalui beberapa akses yang dilaksanakan secara kerjasama instansi lintas sektoral terkait guna memperoleh calon transmigrasi yang berkualitas dan memenuhi kompetensi.
  - Peningkatan pelayanan ketransmigrasian diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lokasi penempatan.
  - Peningkatan mutu pemukiman.

## **B. KEBIJAKAN EKSTERNAL**

1. Mendorong peningkatan pembentukan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, efisien dan berjiwa wira usaha.
2. Mendorong menciptakan lapangan kerja formal yang seluas luasnya.
3. Mengatur mekanisme pemerataan, seleksi dan jaminan penempatan yang sesuai dengan job order bagi TKI.
4. Memfasilitasi dalam upaya penyelesaian Perselisihan.
5. Mendorong pembentukan dan peningkatan peran P2K3, peningkatan syarat kerja, pembentukan PP dan PKB.
6. Mendorong kelembagaan ketenagakerjaan supaya agar lebih meningkat fungsinya.
7. Mendorong peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja wanita dan tenaga kerja anak.
8. Memfasilitasi penempatan calon transmigran terkait dengan instansi lintas sektoral.

9. Mendorong peningkatan pelayanan ketransmigrasian.

### 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Tujuan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif
2. Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*)

Mengacu pada rancangan awal RPD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026 maka dapat diidentifikasi bahwa kontribusi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin dalam tujuan pertama “Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif “ dengan Indikator Tujuan Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Adapun faktor-faktor yang mendukung menjadi pertimbangan Program/Kegiatan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pelayanan urusan dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Peningkatan Kompetensi bagi Pencari Kerja
3. Penempatan Tenaga Kerja
4. Pelaksanaan Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan
5. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Transmigrasi Binaan

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Musi Banyuasin  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.07.3.32.5.06.10.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.5.06.10.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2																		
2	07																	
2	07	01																
2	07	01	2.01															
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan sangat Tepat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	4 Dokumen	100 %	39,610,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan sangat Tepat	100 %	55,000,000
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan sangat Tepat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	4 Laporan	100 %	19,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan sangat Tepat	100 %	55,000,000
2	07	01	2.02															
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	47 Orang/bulan	100 %	5,867,917,567	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan Tepat Waktu	100 %	6,040,578,700
2	07	01	2.03															
2	07	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terpenuhinya Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	1 Dokumen	100 %	26,385,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	30,000,000
2	07	01	2.05															
2	07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan Tepat Waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	1 Paket	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan Tepat Waktu	100 %	70,000,000
2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan Tepat Waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	100 %	3 Orang	100 %	43,125,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan Tepat Waktu	100 %	82,815,000
2	07	01	2.06															
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	1 Paket	100 %	19,997,286	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Musi Banyuasin  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.07.3.32.5.06.10.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.5.06.10.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 07 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	1 Paket	100 %	127,564,974			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	0
2 07 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	1 Paket	100 %	49,667,731	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	80,100,000
2 07 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	1 Paket	100 %	135,026,283	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	180,600,000
2 07 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	2 Paket	100 %	104,322,129	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	233,222,000
2 07 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	2 Dokumen	100 %	24,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	25,000,000
2 07 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	12 Laporan	100 %	10,962,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	9,000,000
2 07 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	537,914,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	504,227,000
<b>2 07 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>737,858,740</b>					<b>1,271,400,000</b>
2 07 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	12 Laporan	100 %	333,658,740	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	500,000,000
2 07 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 %	12 Laporan	100 %	404,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	771,400,000
<b>2 07 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>501,988,910</b>					<b>8,187,430,000</b>
2 07 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 % 100 %	4 Unit	100 %	113,210,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 % 100 %	149,290,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Musi Banyuasin  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.07.3.32.5.06.10.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.5.06.10.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 07 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Barik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	100 % 100 %	4 Unit	100 %	361,838,910	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Barik	100 % 100 %	8,000,000,000
2 07 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Barik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	100 % 100 %	17 Unit	100 %	26,940,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Barik	100 % 100 %	38,140,000
<b>2 07 02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>								<b>404,578,100</b>					<b>700,000,000</b>
<b>2 07 02 2.01</b>	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>								<b>404,578,100</b>					<b>700,000,000</b>
2 07 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100 %	404,578,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah	1 Dokumen	480,000,000
<b>2 07 03</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>								<b>6,769,762,000</b>					<b>20,900,000,000</b>
<b>2 07 03 2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>								<b>6,769,762,000</b>					<b>20,250,000,000</b>
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Terlatih	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n Tersedianya Makan Minum Rapat Tersedianya Seragam Panitia Kegiatan Terselenggaranya Konsultasi dan Koordinasi dengan SKK Migas Terselenggaranya Konsultasi dan Koordinasi Kedaireka Terselenggaranya Konsultasi dan Koordinasi Pelatihan Terselenggaranya Pendampingan BPKP dan Inspektorat Terselenggaranya Program Pemagangan Peserta Pelatihan	Terlatihnya Tenaga Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	24,10 %	52 Orang 30 Kali 50 Stel 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 52 orang	100 %	6,769,762,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tenaga Kerja Terlatih	24,10 %	20,000,000,000
<b>2 07 04</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>								<b>856,057,000</b>					<b>1,963,975,000</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Musi Banyuasin  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.07.3.32.5.06.10.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.5.06.10.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>	<b>Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>227,484,000</b>				<b>500,000,000</b>				
2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Persentase Pekerja yang ditempatkan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapat Fasilitas Layanan ULD	Terselenggaranya Layanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	42,60 %	50 orang	100 %	227,484,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pekerja yang ditempatkan	42,60 %	500,000,000
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>04</b>	<b>2.03</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>					<b>628,573,000</b>				<b>1,463,975,000</b>				
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Pekerja yang ditempatkan	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Pengembangan Website Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. MUBA	Terpenuhinya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,60 %	1 Dokumen 1 Dokumen	100 %	134,320,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pekerja yang ditempatkan	42,60 %	134,000,000
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Pekerja yang ditempatkan	Bursa Tenaga Kerja Khusus Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) Laporan Keberadaan Tenaga Kerja Asing Rekrutmen/ Job Canvasing	Terpenuhinya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,60 %	24 Unit BKK 1850 Orang 15 Perusahaan 10 Kali	100 %	494,253,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pekerja yang ditempatkan	42,60 %	429,975,000
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>05</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>					<b>1,328,810,000</b>				<b>1,640,000,000</b>					
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>779,405,000</b>				<b>890,000,000</b>				
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan	Dokumen Pencatatan PKB Dokumen Pengesahan Peraturan Perusahaan Dokumen Rekomendasi UMK FGD Ketenagakerjaan ( Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan dan KSB dan PKS) Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan Jumlah Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan	Terlaksananya Pelaksanaan Pengesahan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Beroperasi di Kabupaten Musi Banyuasin	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,00 %	10 Dokumen 10 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 7000 orang	100 %	779,405,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan	41,00 %	890,000,000
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>05</b>	<b>2.02</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>549,405,000</b>				<b>750,000,000</b>				



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Musi Banyuasin  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.07.3.32.5.06.10.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.5.06.10.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka Sengke Pengusaha Pekerja Petahun	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan Terselesainya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksanakannya Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial , Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab. Muba	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,8 %	35 Perkara 1 Dokumen	100 %	378,010,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Sengke Pengusaha Pekerja Petahun	7,8 %	400,000,000
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Angka Sengke Pengusaha Pekerja Petahun	Jumlah LKS Bipartit yang dibina dan terbentuk Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Terlaksanakannya Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial , Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab. Muba	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,8 %	16 Lembaga 1 Lembaga	100 %	171,395,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Sengke Pengusaha Pekerja Petahun	7,8 %	350,000,000
<b>3</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>												
<b>3</b>	<b>32</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>							<b>149,271,200</b>				<b>1,910,600,000</b>	
<b>3</b>	<b>32</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>							<b>149,271,200</b>				<b>1,710,600,000</b>	
<b>3</b>	<b>32</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>149,271,200</b>				<b>1,710,600,000</b>	
3	32	03	2.01	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigrasi	Persentase Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Jud II	22 %	1 Dokumen	100 %	149,271,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi	22 %	1,710,600,000
<b>TOTAL</b>												<b>17,785,727,920</b>				<b>45,531,687,700</b>	



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1. PROGRAM KEGIATAN SKPD

Berdasarkan Dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 berdasarkan tujuan Kabupaten **Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif** Indikator Tujuan Kabupaten **Tingkat Pengangguran**, Sasaran Kabupaten **Penyediaan Lapangan Kerja yang di dukung Oleh Tenaga Kerja Terampil**, Indikator Sasaran Kabupaten **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**.

*Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi :*

1

*Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Mendorong Perluasan Kesempatan Kerja Serta Mewujudkan Hubungan Kerja yang Harmonis*

**Rencana Target Sasaran Tahun 2023 :**

**1. Menurunnya Angka Pengangguran**

**Rencana Indikator Sasaran :**

- a) **Tingkat Pengangguran Terbuka (3,98%)**
- b) **Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (51,50)**

Dalam rangka mencapai target Indikator Sasaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin diperlukan dukungan program :

**1) PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**

Indikator Program Dokumen Rencana Kerja 1 Dokumen

- a. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
  - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

Jumlah Dokumen Penyusunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan  
Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen anggaran  
sebesar Rp. 480.000.000,-

## 2. PROGRAM PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Dalam rangka Pencapaian Indikator Kinerja; Persentase Tenaga Kerja Terlatih 24,1% dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja 24,1% sebagai berikut:

### *Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi*

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, indicator kegiatan :

- Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n sebanyak 52 orang.
  - Tersedianya makan minum rapat sebanyak 30 kali
  - Tersedianya seragam panitia kegiatan 50 stel
  - Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi dengan SKK Migas 1 Kegiatan
  - Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi Kedaireka 1 Kegiatan
  - Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi pelatihan 1 kegiatan
  - Terselenggaranya Pendampingan BPKP dan Inspektorat 2 Kegiatan
  - Terselenggaranya program pemagangan peserta pelatihan 52 orang
- Dengan anggaran sebesar Rp. 6.769.762.000,-

## 3. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Dalam rangka capaian persentase pekerja yang ditempatkan 40,66% , untuk pencapaian tersebut di dukung Program dan Kegiatan sebagai berikut :

### **a. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota**

- Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
  - ✓ Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapat fasilitas layanan ULD sebanyak 50 orang dengan anggaran Rp. 227.484.000

### **b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**

- Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online

- ✓ Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online sebanyak 1 Dokumen dan Pengembangan Website Disnakertrans Kab. Muba dengan anggaran Rp. 134.320.000,-
- Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja, Indikator Kegiatan
  - ✓ Bursa Tenaga Kerja Khusus 24 Unit BKK, Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang terdaftar dalam Pasar kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) sebanyak 1850 orang, Laporan Keberadaan Tenaga Kerja Asing 15 Perusahaan, Rekrutmen Job Canvasing 10 Kali dengan anggaran Rp. 429.253.000,-

### **Rencana Target Sasaran Tahun 2023 :**

#### **2. Menurunnya Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja**

##### **Rencana Indikator Sasaran :**

##### **a) Persentasi Tingkat Sengketa Pengusaha Pekerja 7,8%**

#### **1. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**

Rencana Dukungan Pencapaian Indikator Kinerja Program; Angka Sengketa Pengusaha pekerja pertahun 7,8 % dan Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan 41%.

##### **a) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota.**

Penyelenggaraan Pendataan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

- Dokumen Pencatatan PKB sebanyak 10 Dokumen
- Dokumen Pengesahan Peraturan Perusahaan 10 dokumen
- Dokumen Rekomendasi UMK sebanyak 1 Dokumen
- FGD Ketenagakerjaan (Sosialiasi BPJS Ketenagakerjaan dan KSB dan PKS). 1 Dokumen.
- Sarana HI (PP/PKB Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan jumlah pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 7000 orang.



Dengan anggaran Rp. 779.405.000,-

**b) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kkerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota**

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten / kota, dengan indicator :

- Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan 35 Perkara.
- Terelesainya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota sebanyak 1 Dokumen.

Anggaran sebesar Rp. 378.010.000,-

Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota, dengan indicator:

- Jumlah LKS Bipartit yang dibina dan terbentuk sebanyak 16 Lembaga.
- Jumlah LKS Tripartit yang dibina sebanyak 1 Lembaga

Dengan anggaran sebesar Rp. 171.395.000,-

***Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi :***

2

***Meningkatkannya Pelayanan dan Taraf Hidup Masyarakat Transmigrasi***

**Rencana Target Sasaran Tahun 2023 :**

**Terbinanya Warga Transmigrasi**

**Rencana Indikator Sasaran :**

**a) Persentase Pelayanan dan Taraf Hidup Masyarakat Transmigrasi (100%)**

Dukungan Program Kegiatan dalam mencapai rencana Indikator Sasaran :

**1. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

Capaian Indikator Persentase Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi 22%.

**a. Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi Bagi penduduk setempat dan Transmigran**



Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang) sebanyak 1 dokumen dengan anggaran 1 dokumen, anggaran Rp. 149.271.200,-

***Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi :***

3

***Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian***

**Rencana Target Sasaran Tahun 2023 :**

**Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian**

**Rencana Indikator Sasaran :**

**a) Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Bidang Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (100%)**

Dukungan Program Kegiatan dalam mencapai rencana Indikator Sasaran :

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA.**

Capaian Indikator :

- Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan sangat Tepat 100%.
- Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi 100%
- Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan Tepat Waktu 100%
- Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik 100%

**a. Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 4 Dokumen dengan anggaran Rp. 39.610.000.



- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 4 Laporan dengan anggaran Rp. 19.950.000.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Indikator Gaji dan Tunjangan Bagi ASN di Disnakertrans Kab. Muba sebanyak 47 orang selama 12 Bulan Anggaran Rp. 5.867.917.567
- c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD sebanyak 1 Dokumen dengan Anggaran Rp. 26.385.000.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 1 Paket dengan Anggaran Rp. 30.000.000,-
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan sebanyak 3 orang dengan anggaran Rp. 43.125.000,-
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan sebanyak 1 paket dengan anggaran Rp. 19.997.286,-
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan sebanyak 1 paket Rp. 127.564.974,-
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan sebanyak 1 Paket dengan anggaran Rp. 49.667.731,-



- Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan sebanyak 1 paket dengan anggaran Rp. 135.026.283,-
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan 2 dokumen dengan anggaran Rp. 104.322.129,-
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan 2 dokumen dengan anggaran Rp. 24.960.000
- Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, 12 Laporan dengan anggaran Rp.10.962.000.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan dengan anggaran Rp. 537.914.000.

**f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan sebanyak 12 Laporan anggaran Rp. 333.658.740,-
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan sebanyak 12 Laporan dengan anggaran Rp. 404.200.000,-

**g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya sebanyak 4 Unit anggaran Rp. 113.210.000.
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan gedung kantor sebanyak 4 unit dengan anggaran Rp. 361.838.910,-
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau



Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 17 unit dengan anggaran Rp.26.940.000,-

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 Dengan Pagu Anggaran Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Sebesar Rp. 17.636.456.720 dan Pagu anggaran urusan Pemerintah Pilihan sebesar Rp. 149.271.200 jadi total anggaran sebesar Rp. 17.785.727.920.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. CATATAN PENTING YANG MENDAPAT PERHATIAN

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Dokumen Renstra Disnakertrans Tahun 2023-2026 dalam menunjang tercapainya rencana pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023, maka Penetapan Prioritas Pembangunan yang merupakan upaya penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin maupun dengan perangkat daerah yang membidang fungsi lain. Catatan Penting yang mendapat perhatian :

1. Dalam rangka pencapaian Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Perlu dukungan maksimal dalam penyelenggaraan Informasi Lowongan Kerja secara luas, dan peningkatan kompetensi pencari kerja sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja.
2. Optimalisasi dan Revitalisasi UPT Balai Latihan Kerja sebagai penyelenggara tempat pelatihan kerja.
3. Optimalisasi Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan dalam rangka pencapaian Penurunan angka sengketa pengusaha dan pekerja di Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Pembinaan Warga Transmigrasi sebagai Peningkatan Pembinaan Bagi Warga Transmigrasi.

5. Dukungan Anggaran APBD dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin.

## 5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Untuk merealisasikan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 yang penuh tantangan dan dinamika pembangunan, maka digunakan 5(lima) prinsip utama yaitu :

1. Prinsip Perencanaan Kegiatan

Mengacu pada prinsip perencanaan yang cerdas, yaitu kegiatan terpilih harus diyakini argumentatif dan memiliki kekhususan, terukur, ketercapaian, ketersediaan sumber daya dan waktu.

2. Prinsip Administrasi Perencanaan

Yaitu menggunakan *shewhart cycle* yang dikenal direncanakan (*do*), periksa atau monitor pelaksanaan (*check*) dan aksi tindak lanjut (*action*). Untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan pada level perangkat daerah tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota serta Kementerian dan lembaga pemerintah, maka digunakan pembagian peran perangkat daerah Kabupaten untuk melaksanakan RPD berdasarkan misi pembangunan dengan membagi peran perangkat daerah Kabupaten setiap bidang pada setiap misi pembangunan Musi Banyuasin, kelompok PD dibagi 3 yaitu :

1. PD Utama

2. PD Mitra Utama

3. PD pendukung, yang terbagi menjadi 2 kelompok yaitu :

PD Pendukung atas hal yang bersifat umum

PD Pendukung untuk penjaminan mutu dan akuntabilitas

4. Prinsip Pelaksanaan Program dan Kegiatan, menggunakan prinsip akuntabilitas yang memiliki 3 aspek yaitu :

- Taat dan sesuai aturan
- Sesuai dengan norma profesionalisme
- Berorientasi pada hasil yang berkualitas

4. Prinsip dukungan kebijakan keuangan, yang mengikuti kebutuhan program terpilih.

5. Prinsip pengendalian, untuk sukses pelaksanaan kegiatan.

### 5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Dilihat dari capaian indicator Kinerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan tahun 2023, Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah :

- Mendata lowongan Kerja yang ada di perusahaan, dan menempatkan pencari kerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, atau permintaan pasar.
- Meningkatkan kompetensi pencari kerja dengan mengadakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- Menginventaris pencari kerja yang mendaftar kemudian melakukan pendataan apakah sudah bekerja atau belum .
- Melakukan sinergi dengan Berbagai Pihak dalam rangka pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Pengawasan Tenaga Kerja.
- Peningkatan Pembinaan Ketransmigrasian yang berkualitas.

Demikian Rancangan Awal Renja-PD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin terlaksananya penyusunan Renja-PD Disnakertrans Kab. Musi Banyuasin tahun 2023 akan sangat ditentukan oleh partisipasi seluruh aparatur dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap tahunnya. Tercapainya keberhasilan juga sangat ditentukan oleh dukungan berbagai pihak, kebijakan pimpinan di tingkat provinsi dan tersedianya anggaran yang memadai, baik anggaran belanja administrasi umum ataupun anggaran belanja operasional dari beberapa program dan berbagai jenis kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja PD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023.

Sekayu, Juli 2022  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

**H. MURSALIN, SE, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
NIP. 19700331 200003 1 001

### 5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Dilihat dari capaian indicator Kinerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan tahun 2023, Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah :

- Mendata lowongan Kerja yang ada di perusahaan, dan menempatkan pencari kerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, atau permintaan pasar.
- Meningkatkan kompetensi pencari kerja dengan mengadakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- Menginventaris pencari kerja yang mendaftar kemudian melakukan pendataan apakah sudah bekerja atau belum .
- Melakukan sinergi dengan Berbagai Pihak dalam rangka pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Pengawasan Tenaga Kerja.
- Peningkatan Pembinaan Ketransmigrasian yang berkualitas.

Demikian Rancangan Awal Renja-PD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin terlaksananya penyusunan Renja-PD Disnakertrans Kab. Musi Banyuasin tahun 2023 akan sangat ditentukan oleh partisipasi seluruh aparatur dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap tahunnya. Tercapainya keberhasilan juga sangat ditentukan oleh dukungan berbagai pihak, kebijakan pimpinan di tingkat provinsi dan tersedianya anggaran yang memadai, baik anggaran belanja administrasi umum ataupun anggaran belanja operasional dari beberapa program dan berbagai jenis kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja PD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023.

Sekayu, 18 Juli 2022

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**H. MURSALIN, SE, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
NIP. 19700331 200003 1 001